



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
TAHUN 2014**





**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
TAHUN 2014**

## PENGANTAR

Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi. Salah satu ketentuan dalam Perpres 29 Tahun 2014 tersebut mencakup penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah.

Memperhatikan tujuan dan sasaran tahun 2014 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) Tahun 2010-2014, Setjen Wantannas sesuai tugas dan fungsinya sebagai badan fasilitas staf bagi terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) telah menghasilkan saran tindak kepada Presiden dalam menyiapkan pilihan keputusan secara komprehensif integral tentang *defence, security, crisis prevention* dan *resolution* serta arahan-arahan lain dari Presiden R.I. dalam merespon dinamika kehidupan nasional sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Setjen Wantannas Tahun 2014 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Oleh karenanya, Laporan Kinerja Setjen Wantannas Tahun 2014 ini merupakan penjabaran akuntabilitas atas perencanaan strategik Setjen Wantannas yang meliputi Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2014, RKT Tahun 2014 dan Renstra Setjen Wantannas Tahun 2010-2014, serta mengacu juga pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga, Laporan Kinerja Setjen Wantannas Tahun 2014 secara garis-besar memuat perencanaan dan perjanjian kinerja, serta akuntabilitas kinerja Setjen Wantannas tahun 2014 dalam rangkaian pelaporan yang menyeluruh, mengalir dan teratur.

Merujuk hasil pencapaian tugas dan fungsi Setjen Wantannas tahun 2014, maka seluruh kebijakan, program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan dengan baik, selain menunjukkan tercapainya sasaran strategis, indikator dan target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Setjen Wantannas tahun 2014.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi tentang pencapaian kinerja Setjen Wantannas tahun 2014, yakni peran Setjen Wantannas sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab memberikan masukan dan saran tindak kepada Presiden R.I. selaku Ketua Wantannas dalam menghadapi dinamika kehidupan nasional R.I.

Jakarta, 26 Februari 2015

Sekretaris Jenderal  
Dewan Ketahanan Nasional



Waris  
Letnan Jenderal TNI

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional untuk tahun anggaran 2014 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 25 Februari 2015



Ketua Tim Pengawas Internal

Afandi Abdullah, SH.,MA  
Kolonel Arm Nrp.29658

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN TELAH DIREVIU .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi .....	3
D. Sumber Daya Manusia .....	4
E. Sumber Pendanaan .....	5
F. Dasar Hukum .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
A. Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 .....	8
B. Perjanjian Kinerja.....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>14</b>
A. Pengukuran Kinerja .....	14
B. Analisis dan Evaluasi Atas Pencapaian Kinerja .....	15
C. Akuntabilitas Keuangan .....	29
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>35</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

TABEL 1	PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2014 .....	5
TABEL 2	TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR TAHUN 2014.....	9
TABEL 3	STRATEGI KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	11
TABEL 4	PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 .....	13
TABEL 5	PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014 .....	14
TABEL 6	SARAN TINDAK HASIL KAJIAN TAHUN 2014.....	18
TABEL 7	SARAN TINDAK HASIL KAJIAN TAHUN 2010-2014.....	19
TABEL 8	RESPON PRESIDEN ATAS SARAN TINDAK TAHUN 2014.....	20
TABEL 9	RESPON PRESIDEN ATAS SARAN TINDAK TAHUN 2010-2014..	22
TABEL 10	REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM .....	30
TABEL 11	KINERJA PROGRAM SETJEN WANTANNAS.....	30
TABEL 12	REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2014.....	32

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	STRUKTUR ORGANISASI SETJEN WANTANNAS.....	3
GAMBAR 2	GRAFIK JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN .....	4
GAMBAR 3	GRAFIK REALISASI SARAN TINDAK HASIL KAJIAN TAHUN 2010 - 2014.....	20
GAMBAR 4	GRAFIK RESPON PRESIDEN ATAS SARAN TINDAK HASIL KAJIAN TAHUN 2010 - 2014.....	23

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014

LAMPIRAN 2: PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014

LAMPIRAN 3: CHECK LIST REVIU LKj 2014

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) dalam melaksanakan tugas dan fungsi telah menetapkan perencanaan strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Setjen Wantannas periode 2010-2014. Tahun 2014 merupakan tahun terakhir periode rencana strategis dan telah ditetapkan dokumen perencanaan strategis jangka pendek/tahunan yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014. Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2014 tersebut, Setjen Wantannas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perumus rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia telah menghasilkan saran tindak kepada Presiden R.I. selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dalam menyiapkan pilihan keputusan secara komprehensif integral tentang *defence, security, crisis prevention* dan *resolution* serta arahan-arahan lain dari Presiden dalam merespon dinamika kehidupan nasional.

Dokumen saran tindak tersebut, dihasilkan melalui serangkaian kegiatan perumusan kebijakan yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan dalam koridor 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2014, yaitu: (1) Terpenuhinya rumusan kebijakan dan strategi nasional sebagai bahan pengambilan keputusan Presiden R.I. selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia; dan (2) Terpeliharanya seluruh sumber daya dan instrumen kelembagaan Setjen Wantannas untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi.

Gambaran keberhasilan atas pencapaian kinerja Setjen Wantannas tahun 2014 sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) Setjen Wantannas sebagai mana tertuang dalam Keputusan Sesjen Wantannas Nomor: Kep-74/Sesjen/IX/2012, sasaran strategis dari 2 (dua) tujuan yang telah ditetapkan di atas terlihat pada tabel berikut:

### HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tersedianya saran tindak kebijakan ketahanan nasional fokus pada bidang <i>defence, security, crisis prevention and resolution</i> secara komprehensif sebagai masukan Ketua Wantannas (Presiden RI)	Persentase saran tindak hasil kajian dinamis, siklis dan perkiraan cepat bidang kebijakan ketahanan nasional	100 %	100 %	100
	Persentase respon Presiden terhadap saran tindak Setjen Wantannas yang disampaikan kepada Presiden	80 %	85 %	106
Terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan	Opini BPK terhadap laporan keuangan Setjen Wantannas	WTP	)*	)*

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
tugas Setjen Wantannas	Nilai hasil evaluasi Kemen PAN & RB terhadap pelaksanaan kinerja Setjen Wantannas	CC	)*	)*
	Persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN	100 %	100 %	100
	Persentase dokumen program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100
	Persentase unit kerja yang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan	100 %	100 %	100

)\* Sampai dengan tersusunnya Laporan Kinerja 2014 ini, hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan dan hasil evaluasi KemenPan&RB terhadap pelaksanaan kinerja Setjen Wantannas tahun 2014 masih dalam proses.

Secara umum Setjen Wantannas telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis berdasarkan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2014. Namun demikian, dari seluruh target yang telah ditetapkan pada tahun 2014 masih terdapat beberapa target yang belum tercapai secara optimal yang disebabkan adanya beberapa faktor masalah dan kendala yang dihadapi di tingkat koordinasi yaitu pada target terbentuknya Dewan Keamanan Nasional melalui Undang-undang Keamanan Nasional yang hingga saat ini masih berproses. Akan tetapi, dibandingkan tahun sebelumnya pencapaian tersebut terus mengalami peningkatan kualitas sehingga diharapkan target sampai berakhirnya masa dokumen Renstra 2010-2014 dapat tercapai secara optimal.

Beberapa upaya untuk mendorong optimalisasi peningkatan kinerja Setjen Wantannas secara terus-menerus adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Setjen Wantannas dalam memberikan saran tindak kepada Presiden R.I selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional dalam merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis nasional, regional dan global dalam penyusunan perencanaan strategis termasuk penentuan sasaran atau target-target yang lebih khas, terukur, dapat dicapai, realistis, dan sesuai jadwal waktu yang ditentukan (*SMART—specific, measurable, achievable, realistic, and timebond*).
2. Terus melanjutkan program reformasi birokrasi dengan fokus dan konsisten pada pengembangan organisasi dan peningkatan kompetensi SDM Setjen Wantannas agar dapat cepat tanggap dalam memprediksi atau mendeteksi dini (*early warning system*) terhadap perubahan lingkungan strategis nasional, regional maupun global sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah antisipatif dalam memecahkan persoalan ketahanan nasional R.I.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**  
**TAHUN 2014**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Keputusan Presiden R.I. Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden R.I. selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional yang mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Setjen Wantannas mengkoordinasikan dan menyiapkan rekomendasi sebagai saran kebijakan strategis dalam mengatasi permasalahan di bidang keamanan nasional pada khususnya, dan Ketahanan Nasional pada umumnya.

Pada tahun 2014, Setjen Wantannas melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pembinaan ketahanan nasional, yaitu melaksanakan tugas utamanya sebagai lembaga perumus kebijakan ketahanan nasional dalam menghasilkan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia melalui serangkaian kegiatan perumusan kebijakan yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan. Berdasarkan tugas tersebut, Setjen Wantannas akan menjelaskan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2014.

Pertanggungjawaban kinerja Setjen Wantannas Tahun 2014 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja Setjen Wantannas Tahun 2014 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja unit kerja eselon 1 dan 2 secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir Lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban Sesjen Wantannas sebagai Sekretaris Dewan merangkap anggota Dewan Ketahanan Nasional dalam melaksanakan tugas-tugas organisasinya.

## **B. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 101 tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Setjen Wantannas mempunyai fungsi :

1. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
2. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara;
3. Penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

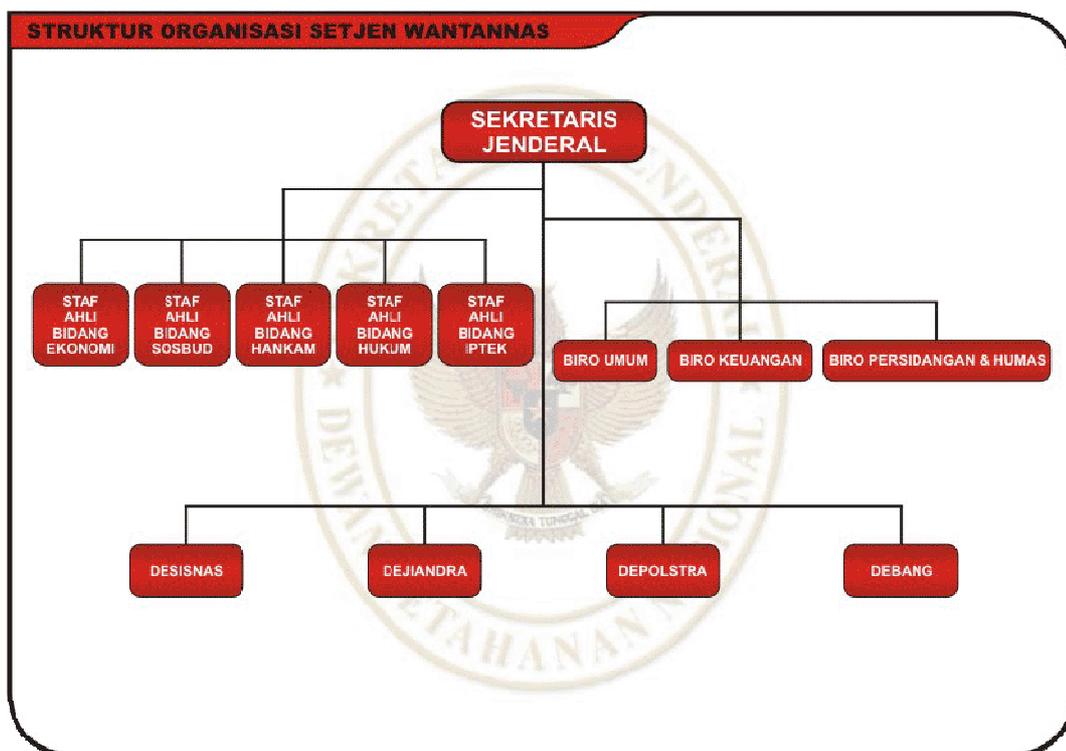
Setjen Wantannas dalam perkembangannya juga melaksanakan arahan/direktif dari Presiden selaku Ketua Wantannas yaitu pengelolaan secara lebih terintegrasi, efektif, dan efisien didukung oleh kemampuan dan peran

lembaga-lembaga keamanan nasional dalam merumuskan dan mengintegrasikan kebijakan di bidang keamanan nasional masih harus ditingkatkan, melalui serangkaian kajian strategis. Materi kajian ditinjau dari segi *defence, security, crisis prevention, crisis resolution* dalam kerangka keamanan internal, keamanan eksternal dan bencana skala besar meliputi aspek politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan-keamanan, agar lebih dapat dilaksanakan secara *operable, capable, implementable* yang sifatnya *action to be taken* dan komprehensif integral (lintas kementerian - lintas kewilayahan).

**C. Struktur Organisasi**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun struktur organisasi Setjen Wantannas berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor: 1.1101.30013101 tanggal 31 Januari 2000 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Secara garis besar struktur organisasi Setjen Wantannas adalah sebagai berikut:

**GAMBAR 1  
STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

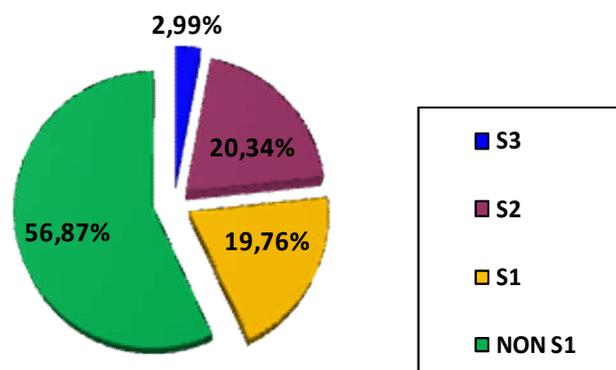


Organisasi Setjen Wantannas terdiri dari 9 unit kerja eselon I, yaitu: Kedeputan Bidang Sistem Nasional; Kedeputan Bidang Pengkajian dan Penginderaan; Kedeputan Bidang Politik dan Strategi; Kedeputan Bidang Pengembangan; Staf Ahli Bidang Sosial Budaya; Staf Ahli Bidang Ekonomi; Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan; Staf Ahli Bidang Hukum; dan Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan, Organisasi Setjen Wantannas terdiri dari 3 unit kerja eselon II, yaitu Biro Umum; Biro Keuangan; dan Biro Persidangan dan Humas.

#### D. Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia yang tersedia relatif kurang memadai apabila dibandingkan dengan besarnya beban tugas dan fungsi Setjen Wantannas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Desember 2014, kekuatan sumber daya manusia Setjen Wantannas adalah sebanyak 167 orang, terdiri atas 80 pegawai organik, 56 pegawai perbantuan, dan 31 pegawai diperbantukan. Dari sejumlah itu 5 orang (2,99%) di antaranya berpendidikan doktor; 34 orang (20,34%) master; 33 orang (19,76%) sarjana; 95 orang (56,87%) sarjana muda/D3, SLTA, dan SLTP/SD sebagaimana Gambar 1 dan Tabel 1. Dari pegawai tersebut 88 orang pegawai yang menduduki jabatan struktural dan sisanya sebanyak 48 orang sebagai tenaga fungsional.

**GAMBAR 2**  
**GRAFIK JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**



Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Setjen Wantannas melaksanakannya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan diklat di antaranya diklat penjenjangan baik struktural dan diklat fungsional teknis yang sesuai dengan kebutuhan para tata usaha atau dalam menunjang kesekretariatan khususnya dalam bidang informasi teknologi, dan diklat substansi yaitu diklat yang dirancang untuk menunjang keahlian dan menambah wawasan di bidang yang terkait dengan sektor bidang tugasnya.

**TABEL 1.**  
**PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2014**  
**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

NO	NAMA JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		S3	S2	S1	Non S1	
1	Pejabat Negara	-	-	-	1	1
2	Eselon Ia	-	3	-	1	4
3	Eselon Ib	2	1	1	1	5
4	Eselon IIa	2	22	7	7	38
5	Eselon IIb	1	8	1	2	12
6	Eselon III	-	1	7	1	9
7	Eselon IV	-	-	7	12	19
8	Fungsional Umum	-	-	10	38	48
9	Pengemudi	-	-	-	10	10
10	Pengamanan Dalam	-	-	-	4	4
11	Tenaga Kebersihan	-	-	-	8	8
12	Pramusaji	-	-	-	4	4
	Jumlah Total	5	35	34	87	161

#### **E. Sumber Pendanaan**

Pada tahun anggaran 2014, Setjen Wantannas mendapat alokasi pagu sebesar Rp 31.049.505.000,- (tiga puluh satu milyar empat puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah), namun dengan adanya kebijakan Pemerintah dalam rangka penghematan APBN maka terjadi perubahan pagu anggaran menjadi Rp 27.456.304.000,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat ribu rupiah) dan mendapatkan alokasi dari BA-BUN dalam rangka pembayaran tunjangan kinerja pagu anggaran terakhir menjadi Rp 38.659.320.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis belanja, terdiri dari :

1) Belanja Pegawai	: Rp 17.885.770.000,-
2) Belanja Barang	: Rp 20.553.405.000,-
3) Belanja Modal	: <u>Rp 220.145.000,-</u>
Jumlah	: Rp 38.659.320.000,-

b. Berdasarkan jenis program :

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Wantannas:	Rp 24.454.661.000,-
a) Perencanaan Program & Minkeu	Rp 18.099.720.000,-
b) Pelayanan Persidangan & Humas	Rp 189.090.000,-
c) Pelayanan Tata Usaha & Minu	Rp 913.395.000,-
d) Pembinaan Adm. Kepegawaian	Rp 278.058.000,-
e) Pengelolaan Asset Wantannas	Rp 4.974.398.000,-

2) Program Pengembangan Kebijakan

Ketahanan Nasional:	Rp 14.204.659.000,-
a) Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional	Rp 14.042.444.000,-
b) Pengembangan Sisfo Wantannas	Rp 162.215.000,-

## F. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Keputusan Presiden Nomor 101/1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor: 1.1101.30013101 tanggal 31 Januari 2000 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
10. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2010 – 2014;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor: Kep-65/Sesjen/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2014;
12. Surat Pengesahan DIPA Induk Setjen Wantannas Nomor: SP DIPA-052.01-0/AG/2014 tanggal 5 Desember 2013.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) Setjen Wantannas 2010-2014 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas fungsi dan peran yang diamanahkan. Secara ringkas substansi renstra Setjen Wantannas dapat diilustrasikan sebagai berikut:

##### 1. Visi

Menjadikan badan fasilitas staf bagi Presiden selaku Ketua Wantannas, yang mampu memenuhi kebutuhan Ketua Wantannas dalam menyiapkan pilihan keputusan secara komprehensif integral tentang *defence, security, crisis prevention* dan *resolution* serta arahan-arahan lain dari Presiden dalam merespon dinamika kehidupan nasional.

##### 2. Misi

- a. Menyediakan *optional decision* yang operasional dalam seluruh aspek kehidupan nasional yang terkait erat dengan ancaman tradisional dan non tradisional.
- b. Mengintegrasikan berbagai pemikiran dari jalur aspiratif, akademik, dan empirik secara komprehensif integral melalui proses lintas sektoral, lintas fungsional, dan lintas disiplin ilmu.
- c. Menyediakan *day to day report* berisi saran pengambil keputusan cepat menghadapi dinamika kehidupan nasional yang berubah serba cepat.
- d. Menyediakan informasi akurat, terpercaya, cepat melalui sistem informasi Setjen Wantannas yang *compatible* dengan sistem informasi K/LPNK dan sistem informasi pemerintah daerah.
- e. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan direktif Presiden selaku Ketua Wantannas kepada seluruh K/LPNK, Pemda Provinsi, Kab/Kota, serta kemungkinan risiko yang dihadapi.

- f. Memelihara seluruh sumber daya dan instrumen kelembagaan Setjen Wantannas untuk mendukung kelancaran tupoksi.

### 3. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Setjen Wantannas dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setjen Wantannas tahun 2014 dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Setjen Wantannas sebagai mana tertuang dalam Keputusan Sesjen Wantannas Nomor: Kep-74/Sesjen/IX/2012, sebagai berikut:

**TABEL 2.**  
**TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR TAHUN 2014**  
**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Terpenuhinya rumusan kebijakan dan strategi nasional sebagai bahan pengambilan keputusan Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.	Tersedianya saran tindak kebijakan ketahanan nasional fokus pada bidang <i>defence, security, crisis prevention and resolution</i> secara komprehensif sebagai masukan Ketua Wantannas (Presiden RI)	Persentase saran tindak hasil kajian dinamis, siklis dan perkiraan cepat bidang kebijakan ketahanan nasional
			Persentase respon Presiden terhadap saran tindak Setjen Wantannas yang disampaikan kepada Presiden
2	Terpeliharanya seluruh sumber daya dan instrumen kelembagaan Setjen Wantannas untuk mendukung kelancaran tupoksi.	Terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas Setjen Wantannas	Opini BPK terhadap laporan keuangan Setjen Wantannas
			Nilai hasil evaluasi Kemen Pan & RB terhadap pelaksanaan kinerja Setjen Wantannas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
			Persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN
			Persentase dokumen program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu
			Persentase unit kerja yang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan

#### 4. Kebijakan, Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2010 – 2014 tersebut diatas, telah ditetapkan berbagai kebijakan, program, kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kebijakan Setjen Wantannas ditetapkan berdasarkan arah kebijakan nasional sebagaimana dalam RPJMN 2010-2104 serta kebijakan internal yang akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Setjen Wantannas sebagai lembaga fasilitas staf Presiden dalam merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Selanjutnya Setjen Wantannas menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung tugas-tugas sebagai lembaga perumus kebijakan ketahanan nasional. Adapun program-program tersebut terdiri dari program utama (prioritas) dan program pendukung (generik). Penjelasan masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut:

##### a. Program utama

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas prioritas Setjen Wantannas yang dimulai dari proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi perumusan kebijakan ketahanan nasional. Program ini berjumlah 1 (satu) program, yaitu : Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional.

b. Program pendukung

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Setjen Wantannas khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan baik dari aspek perencanaan, keuangan, persidangan, humas, kepegawaian, kerumahtanggaan dan administrasi umum. Program ini berjumlah 1 (satu) program, yaitu : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas

Dari berbagai program tersebut telah dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan-kegiatan baik yang mendukung tugas-tugas utama maupun tugas pendukung dalam melaksanakan kewenangan Setjen Wantannas. Adapun penjabaran kegiatan-kegiatan tersebut berdasarkan strategi/kebijakan, tercermin dalam tabel di bawah ini.

**TABEL 3.**  
**STRATEGI, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2014**  
**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

<b>Strategi Kebijakan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
1. Mengarahkan seluruh komponen kekuatan Setjen Wantannas khususnya personel pemikir untuk melakukan telaahan baik yang bersifat siklis maupun dinamis disesuaikan dengan dinamika seluruh aspek kehidupan nasional.	Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	1. Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional
2. Mengarahkan seluruh komponen kekuatan Setjen Wantannas agar mampu mengembangkan inisiatif, kemudahan untuk memperoleh akses peningkatan kapasitasnya, dan penguatan tupoksi yang bersangkutan.		2. Pengembangan Sistem Informasi Wantannas
3. Mengarahkan penguatan jejaring kepakaran melalui komunikasi konstruktif dan		

Strategi Kebijakan	Program	Kegiatan
kemitraan strategis dengan para pakar yang mewakili jalur aspiratif (anggota DPR, LSM terpilih, pengamat atau pemerhati), jalur akademik (para ilmuwan) dan jalur empirik (birokrat terpilih).		
4. Mengarahkan seluruh sumber daya Setjen Wantannas agar mampu menunjang berbagai program kegiatan yang telah dirancang Renstra dan Rencana Kinerja tahunan secara efektif dan efisien.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas	3. Perencanaan Program dan Pengelolaan Administrasi Keuangan 4. Pelayanan Persidangan dan Hubungan Masyarakat 5. Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga 6. Pembinaan Administrasi Kepegawaian 7. Pengelolaan Asset Wantannas

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang mengacu pada rencana kerja Setjen Wantannas. Rencana kerja tersebut merupakan penjabaran dari Renstra Setjen Wantannas 2010-2014. Sesuai dengan Rencana Kerja Setjen Wantannas tahun 2014 telah ditetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan tujuan dan sasarannya. Selanjutnya kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Setjen Wantannas tersebut menjadi acuan dalam penjabaran program dan kegiatan mulai unit kerja eselon I sampai unit kerja eselon II sesuai dengan fungsinya. Rencana kerja disetiap unit kerja eselon I dan eselon II tersebut akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana kinerja tahunan masing-masing unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II yang selanjutnya menjadi penetapan kinerja atau kontrak kinerja dengan Pimpinan Setjen Wantannas.

Pada tahun 2014, Setjen Wantannas telah menetapkan kembali rencana kinerja tahunan sebagai penetapan kinerja tahun ke 5 (lima). Penetapan kinerja tersebut memuat Sasaran Strategis, Indikator dan Target Setjen Wantannas Tahun 2014 yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Setjen Wantannas 2010-2014. Adapun penetapan kinerja Setjen Wantannas tahun 2014 yang mengacu juga pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Setjen Wantannas sebagai mana tertuang dalam Keputusan Sesjen Wantannas Nomor: Kep-74/Sesjen/IX/2012, adalah sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

**TABEL 4.**  
**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014**  
**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Tersedianya saran tindak kebijakan ketahanan nasional fokus pada bidang <i>defence, security, crisis prevention and resolution</i> secara komprehensif sebagai masukan Ketua Wantannas (Presiden RI)	Persentase saran tindak hasil kajian dinamis, siklis dan perkiraan cepat bidang kebijakan ketahanan nasional	100 Persen
	Persentase respon Presiden terhadap saran tindak Setjen Wantannas yang disampaikan kepada Presiden	80 Persen
Terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas Setjen Wantannas	Opini BPK terhadap laporan keuangan Setjen Wantannas	WTP
	Nilai hasil evaluasi Kemen Pan & RB terhadap pelaksanaan kinerja Setjen Wantannas	CC
	Persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN	100 Persen
	Persentase dokumen program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen
	Persentase unit kerja yang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan	100 Persen

Jumlah Anggaran Tahun 2014: Rp38.659.320.000,-

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pengukuran Kinerja

Dalam bab ini akan diuraikan pencapaian kinerja Setjen Wantannas Tahun 2014 sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II merupakan pencapaian atas target kinerja tahun keempat dari Renstra Setjen Wantannas 2010-2014 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Setjen Wantannas menetapkan 2 tujuan yang akan dicapai untuk tahun 2014 adalah:

1. Terpenuhinya rumusan kebijakan dan strategi nasional sebagai bahan pengambilan keputusan Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.
2. Terpeliharanya seluruh sumber daya dan instrumen kelembagaan Setjen Wantannas untuk mendukung kelancaran tupoksi.

Dari tujuan tersebut merupakan gambaran keberhasilan atas pencapaian kinerja Setjen Wantannas sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menghasilkan rumusan kebijakan dan strategi nasional sebagai bahan pengambilan keputusan Presiden. Kedua tujuan tersebut telah ditetapkan target kinerja sesuai dengan indikator kinerja masing-masing sasaran strategis. Adapun hasil pencapaian target kinerja masing-masing sasaran strategis Setjen Wantannas untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut:

**TABEL 5.**  
**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014**  
**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tersedianya saran tindak kebijakan ketahanan nasional fokus pada bidang <i>defence, security,</i>	Persentase saran tindak hasil kajian dinamis, siklis dan perkiraan cepat bidang kebijakan ketahanan	100 %	100 %	100

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<i>crisis prevention and resolution</i> secara komprehensif sebagai masukan Ketua Wantannas (Presiden RI)	nasional			
	Persentase respon Presiden terhadap saran tindak Setjen Wantannas yang disampaikan kepada Presiden	80 %	85 %	106
Terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas Setjen Wantannas	Opini BPK terhadap laporan keuangan Setjen Wantannas	WTP	)*	)*
	Nilai hasil evaluasi Kemen Pan & RB terhadap pelaksanaan kinerja Setjen Wantannas	CC	)*	)*
	Persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN	100 %	100 %	100
	Persentase dokumen program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100
	Persentase unit kerja yang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan	100 %	100 %	100

)\* Sampai dengan tersusunnya Laporan Kinerja 2014 ini, pemeriksaan BPK atas laporan keuangan masih berlangsung, dan hasil evaluasi KemenPAN&RB terhadap pelaksanaan kinerja Setjen Wantannas tahun 2014 masih dalam proses.

## B. Analisis dan Evaluasi Atas Pencapaian Kinerja

1. Tujuan 1: Terpenuhinya rumusan kebijakan dan strategi nasional sebagai bahan pengambilan keputusan Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional

**untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.**

Sesuai dengan indikator kinerja tahun 2014, Setjen Wantannas melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga perumus kebijakan ketahanan nasional, ***telah menghasilkan saran tindak kebijakan ketahanan nasional fokus pada bidang defence, security, crisis prevention and resolution secara komprehensif sebagai masukan Ketua Wantannas (Presiden RI)***, dan telah mendapatkan respon presiden berupa disposisi kepada kementerian/lembaga terkait.

Naskah saran tindak kebijakan ketahanan nasional dimaksud adalah naskah yang bersifat siklis, dinamis, dan perkiraan cepat. Naskah siklis yang dihasilkan pada tahun 2014 terdiri dari Apresiasi Strategi Nasional 2015 (Apstranas), Perkiraan Strategi Nasional 2015 (Kistranas), Rencana Kontijensi Nasional 2015 (Renkonnas), dan Telaahan Strategis Nasional (Telstranas) 2015-2019. Sementara itu naskah dinamis yang dihasilkan pada tahun 2014 adalah naskah kajian berupa saran tindak pemecahan masalah krusial mendesak dengan fokus pada permasalahan nasional yang strategis. Sedangkan naskah perkiraan cepat yang dihasilkan pada tahun 2014 adalah naskah kajian berupa saran tindak pemecahan masalah dengan fokus pada permasalahan nasional strategis yang diperkirakan dapat berdampak pada terganggunya stabilitas keamanan apabila tidak cepat dilakukan langkah penanganannya.

Naskah kajian yang bersifat siklis dan dinamis tahun 2014 tersebut dihasilkan melalui suatu tahapan atau proses perumusan yang dimulai dari Rapat Kelompok Kerja (Pokja), Rapat Kerja Terbatas (Rakertas), Rapat Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus), Rapat Perumusan Materi (Ramusmat) serta rapat-rapat lainnya. Disamping itu, kajian yang bersifat perkiraan cepat dilakukan melalui pandangan terhadap terjadinya dinamika kehidupan nasional yang memerlukan penanganan segera berupa saran tindak kepada Ketua Wantannas (yaitu Presiden R.I.) atau turun langsung ke lapangan, baik wilayah dalam negeri atau disebut Kajian Daerah (Kajida) maupun wilayah luar negeri atau disebut Kajian Luar Negeri (Kajilu), serta dan Rapat Kelompok Kerja (Pokja) yang kesemuanya melibatkan para pakar di bidangnya. Para pakar atau disebut narasumber meliputi tiga jalur kepakaran

yaitu jalur praktisi, akademisi maupun birokrasi. Selanjutnya naskah kajian tahun 2014 tersebut dilaporkan ke Presiden R.I. selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai rekomendasi kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional.

Untuk mengetahui hasil pengukuran kualitas naskah saran tindak kebijakan ketahanan nasional tahun 2014 telah ditetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam strategi dan tujuan yang pertama. Kedua indikator tersebut diharapkan dapat menjelaskan pencapaian kinerja sasaran strategis Setjen Wantannas dalam melakukan perumusan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia sehingga diharapkan peran Setjen Wantannas dapat mendorong pencapaian tujuan, menjamin kepentingan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2014 dan telah dicapai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

- a. Indikator pertama adalah persentase saran tindak hasil kajian dinamis, siklis dan perkiraan cepat bidang kebijakan ketahanan nasional telah tercapai sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan.
- b. Indikator kedua adalah persentase respon Presiden R.I. terhadap saran tindak Setjen Wantannas yang disampaikan kepada Presiden R.I. telah tercapai sebesar 80% dari target 80% yang telah ditetapkan.

Adapun hasil analisa dan evaluasi atas pencapaian masing-masing indikator kinerja tersebut diatas sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan pertama adalah sebagai berikut :

**a. Persentase saran tindak hasil kajian dinamis, siklis dan perkiraan cepat bidang kebijakan ketahanan nasional**

Capaian kinerja atas saran tindak hasil kajian dinamis, siklis dan perkiraan cepat (kirpat) bidang kebijakan ketahanan nasional sebagai salah satu indikator kinerja tersedianya saran tindak kebijakan ketahanan nasional fokus pada bidang *defence, security, crisis prevention and resolution* secara komprehensif sebagai masukan Ketua Wantannas

(Presiden R.I.) tahun anggaran 2014 Setjen Wantannas dapat dijelaskan sebagaimana tercantum dalam Tabel 6 berikut:

**TABEL 6.**  
**SARAN TINDAK HASIL KAJIAN TAHUN 2014**  
**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

Indikator	Target	Realisasi 2014	Capaian	Realisasi	
				2013	2012
Kajian Siklis	4	4	100%	100%	100%
Kajian Dinamis	36	36	100%	115%	142%
Kajian Kirpat	43	43	100%	100%	100%
Kajian Semiloka	4	4	100%	100%	100%
Kajian Daerah	14	14	100%	100%	100%
Jumlah	101	101	100%	103%	110%

Jumlah Kajian Siklis dari target 4 naskah yang terdiri dari Apresiasi Strategi Nasional 2015 (Apstranas), Perkiraan Strategi Nasional 2015 (Kistranas), Rencana Kontijensi Nasional 2015 (Renkonnas), dan Telaahan Strategis Nasional (Telstranas) 2015-2019 dapat direalisasikan sebanyak 4 naskah (100%), sehingga dapat direalisasikan keseluruhan target.

Jumlah Kajian Dinamis dari target 36 naskah yang terdiri dari kajian di bidang pertahanan (*security*), keamanan (*defence*), penanggulangan dan pencegahan krisis (*crisis prevention and resolution*) dapat dihasilkan sebanyak 36 naskah (100%), sehingga target yang telah ditetapkan dapat dicapai seluruhnya.

Jumlah Kajian Perkiraan Cepat (Kirpat) yaitu suatu kajian yang bersifat segera/krusial mendesak dari target yang ditetapkan sebanyak 43 naskah dapat direalisasikan sebanyak 43 naskah (100%), sehingga keseluruhan target dapat direalisasikan.

Jumlah Kajian Seminar/Lokakarya (Semiloka) yaitu suatu kajian terkait permasalahan khusus yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian masalah nasional dari target yang ditetapkan sebanyak 4 naskah dapat direalisasikan sebanyak 4 naskah (100%), sehingga target yang telah ditetapkan dapat dicapai seluruhnya.

Jumlah Kajian Daerah (Kajida) yaitu suatu kajian kewilayahan terkait permasalahan daerah yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian masalah nasional dari target yang ditetapkan sebanyak 14 naskah dapat direalisasikan sebanyak 14 naskah (100%), sehingga keseluruhan target dapat direalisasikan.

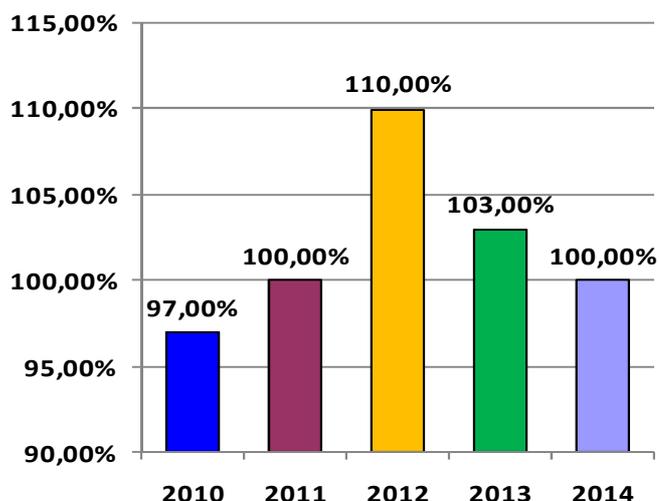
Dengan demikian persentase saran tindak hasil kajian dinamis, siklis, kirpat, semiloka dan kajida bidang kebijakan ketahanan nasional yang ditargetkan 100% seluruhnya dapat diwujudkan ketercapaiannya.

Realisasi saran tindak hasil kajian Setjen Wantannas dalam satu kurun waktu Renstra selama 5 (lima) tahun dari 2010 sampai 2014 menunjukkan konsistensi perbaikan capaian realisasi dari 97% di awal pada tahun 2010 dan tetap dapat dipertahankan pada capaian maksimal 100% atau lebih di tahun-tahun berikutnya. Persentase yang semula masih di bawah 100% adalah dalam indikator kajian Perkiraan Cepat dalam upaya menyusun alternatif solusi dan rekomendasi permasalahan yang krusial mendesak. Sedangkan kajian yang lain dapat dicapai sesuai target atau bahkan melebihi 100%. Secara faktual data tersaji sebagai berikut:

**TABEL 7.**  
**REALISASI SARAN TINDAK HASIL KAJIAN TAHUN 2010 - 2014**  
**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

Indikator	Realisasi				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kajian Siklis	100%	100%	100%	100%	100%
Kajian Dinamis	100%	115%	142%	115%	100%
Kajian Kirpat	87%	86%	100%	100%	100%
Kajian Semiloka	100%	100%	100%	100%	100%
Kajian Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah	97%	100%	110%	103%	100%

**GAMBAR 3.**  
**GRAFIK REALISASI SARAN TINDAK HASIL KAJIAN TAHUN 2010 - 2014**



**b. Persentase respon Presiden terhadap saran tindak Setjen Wantannas yang disampaikan kepada Presiden R.I.**

Respon Presiden R.I. adalah disposisi dari Presiden R.I. selaku Ketua Wantannas atas saran tindak dari Setjen Wantannas untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait. Persentase capaian kinerja atas respon Presiden terhadap saran tindak Setjen Wantannas yang disampaikan kepada Presiden sebagai salah satu indikator kinerja tersedianya saran tindak kebijakan ketahanan nasional fokus pada bidang *defence, security, crisis prevention and resolution* secara komprehensif sebagai masukan Ketua Wantannas (Presiden) tahun anggaran 2014 dapat dijelaskan sebagaimana tercantum dalam Tabel 8 berikut:

**TABEL 8.**  
**RESPON PRESIDEN ATAS SARAN TINDAK**  
**HASIL KAJIAN TAHUN 2014**  
**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

Indikator	Target	Realisasi 2014	Capaian	Realisasi	
				2013	2012
Kajian Siklis	80%	75%	93%	100%	67%
Kajian Dinamis	80%	80%	100%	77%	70%
Kajian Kirpat	80%	85%	106%	78%	64%
Kajian Semiloka	80%	100%	125%	100%	100%

Indikator	Target	Realisasi 2014	Capaian	Realisasi	
				2013	2012
Kajian Daerah	80%	85%	106%	88%	75%
Keseluruhan	80%	85%	106%	88%	75%

Persentase Kajian Siklis yaitu kajian yang diselenggarakan secara berlanjut sesuai periode waktu tertentu dan berjangka dari target mendapatkan respon Presiden sebesar 80% mendapat respon sebanyak 75%, sehingga kriteria keberhasilan dalam perumusan kebijakan khususnya pada kajian siklis pencapaiannya sedikit dibawah target yang telah ditetapkan sebesar 80%.

Persentase Kajian Dinamis dari target mendapatkan respon Presiden sebesar 80% yang terdiri dari kajian di bidang pertahanan (*security*), keamanan (*defence*), penanggulangan dan pencegahan krisis (*crisis prevention and resolution*) mendapat respon sebanyak 80%, sehingga kriteria keberhasilan dalam perumusan kebijakan khususnya pada kajian dinamis pecapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan.

Persentase Kajian Perkiraan Cepat (Kirpat) yaitu suatu kajian yang bersifat segera/krusial mendesak dari target mendapatkan respon Presiden yang ditetapkan sebanyak 80% diperoleh fakta bahwa mendapat respon sebanyak 85%, sehingga kriteria keberhasilan dalam perumusan kebijakan khususnya pada kajian kirpat pecapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan.

Persentase Seminar/Lokakarya (Semiloka) yaitu suatu kajian terkait permasalahan khusus yang dilakukan kajiannya bersama berbagai Perguruan Tinggi di daerah dari target mendapatkan respon Presiden yang ditetapkan sebanyak 80% ternyata mendapat respon sebanyak 100%, sehingga kriteria keberhasilan dalam perumusan kebijakan khususnya pada kajian semiloka pencapaiannya 20% melebihi target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian persentase keseluruhan saran tindak hasil kajian dinamis, siklis, kirpat, dan semiloka bidang kebijakan ketahanan nasional yang ditargetkan 80% mendapat respon sebanyak 85%. Dapat dikatakan bahwa kriteria keberhasilan dalam perumusan kebijakan ketahanan

nasional tahun 2014 dapat dicapai melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 5% lebih tinggi.

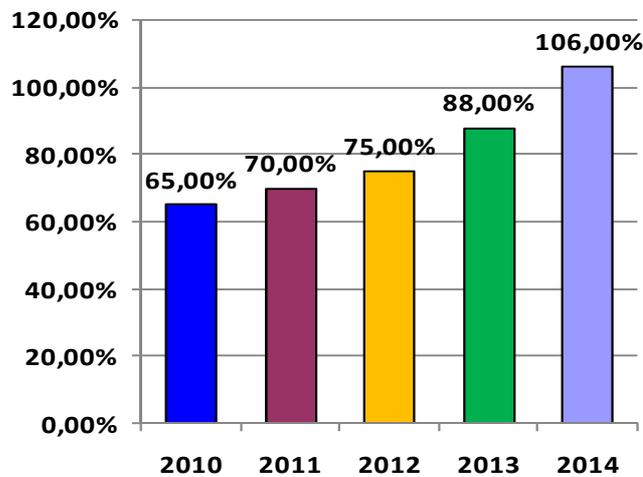
Dari hasil produk kajian yang berupa saran tindak dan saran kebijakan sebanyak 87 masukan kepada Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional ternyata dari hasil monitor, saran tindak yang direspon oleh Presiden sebanyak 74 masukan (85%). Hal ini karena saran tindak dan saran kebijakan yang disampaikan Setjen Wantannas kepada Presiden sebagian didisposisikan ke K/L terkait untuk ditindaklanjuti, dan sebagian lainnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan kenegaraan. Selisih persentase tersebut sebagai akibat tidak semua saran tindak merupakan konsumsi para K/L, melainkan juga internal masukan bagi Presiden R.I.

Realisasi respon Presiden atas saran tindak hasil kajian Setjen Wantannas dalam satu kurun waktu Renstra selama 5 (lima) tahun dari 2010 sampai 2014 menunjukkan perbaikan capaian realisasi yang signifikan dari 65% di awal pada tahun 2010 dan tercapai hingga 106% pada akhir periode 5 (lima) tahun. Secara faktual data tersaji sebagai berikut:

**TABEL 9.**  
**RESPON PRESIDEN ATAS SARAN TINDAK**  
**HASIL KAJIAN TAHUN 2010 - 2014**  
**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

Indikator	Realisasi				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kajian Siklis	60%	70%	67%	100%	93%
Kajian Dinamis	62%	65%	70%	77%	100%
Kajian Kirpat	60%	75%	64%	78%	106%
Kajian Semiloka	75%	70%	100%	100%	125%
Kajian Daerah	70%	70%	75%	88%	106%
Jumlah	65 %	70%	75%	88%	106%

**GAMBAR 4.**  
**GRAFIK RESPON PRESIDEN ATAS SARAN TINDAK**  
**HASIL KAJIAN TAHUN 2010 - 2014**



**2. Tujuan 2: Terpeliharanya seluruh sumber daya dan instrumen kelembagaan Setjen Wantannas untuk mendukung kelancaran tupoksi.**

Pelaksanaan pengembangan kapasitas seluruh sumber daya dan instrumen kelembagaan Setjen Wantannas merupakan tujuan tambahan untuk dapat memberikan gambaran keberhasilan atas pelaksanaan tugas-tugas pendukung Setjen Wantannas tahun 2014 dengan sasaran strategis adalah terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas Setjen Wantannas.

Untuk mengetahui hasil pengukuran terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas Setjen Wantannas tahun 2014 telah ditetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama sebagaimana sasaran strategis dan tujuan pertama. Kelima indikator tersebut diharapkan dapat menjelaskan pencapaian kinerja sasaran strategis Setjen Wantannas dalam melakukan pengembangan kapasitas seluruh sumber daya dan instrumen kelembagaan Setjen Wantannas sehingga diharapkan mendukung pencapaian tupoksi Setjen Wantannas.

Sebagaimana Tabel 5, hasil pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan kedua Setjen Wantannas telah merealisasikan hasil capaian berdasarkan target rencana dalam penetapan kinerja tahun 2014.

Adapun penjelasan hasil capaian pengukuran kinerja dari sasaran dan tujuan kedua untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- a. Indikator pertama adalah opini BPK terhadap Laporan Keuangan Setjen Wantannas pada saat terselesaikannya naskah LAKIP ini masih diadakan pemeriksaan oleh BPK. Sebagai gambaran untuk Opini BPK atas laporan keuangan Setjen Wantannas yang diterima pada tahun 2014 adalah telah tercapai predikat WTP untuk laporan keuangan tahun 2013 dari target WTP yang telah ditetapkan.

Salah satu ukuran keberhasilan indikator lainnya dalam pencapaian peningkatan kapasitas seluruh sumber daya dan instrumen kelembagaan Setjen Wantannas adalah adanya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Setjen Wantannas tahun 2013 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2014 merupakan capaian kinerja tahun 2013. Sedangkan untuk tahun 2014, sampai dengan dibuatnya laporan ini masih dalam proses pemeriksaan BPK. Prestasi ini menjadikan Setjen Wantannas sebagai Lembaga yang meraih opini WTP selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut (Laporan Keuangan tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dua hal penting atas dampak hasil opini tersebut, yaitu: pertama, opini WTP dapat menggambarkan akuntabilitas institusi baik dalam pengelolaan keuangan maupun kinerja, sehingga akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas dapat terjaga. Kedua, opini WTP merupakan wujud tercapainya salah satu kontrak kinerja yang sudah ditandatangani Setjen Wantannas.

Prestasi opini tertinggi ini dicapai melalui kerja keras dan upaya perbaikan serta koordinasi dan kerjasama seluruh unit kerja di Setjen Wantannas, khususnya unit kerja Biro Keuangan sebagai Koordinator penyusunan laporan Keuangan Setjen Wantannas. Untuk mengukur pencapaian opini BPK atas Laporan Keuangan adalah melalui pemeriksaan oleh Auditor eksternal, yaitu oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) secara rutin setiap tahun dengan menggunakan Metode Penilaian yang ditetapkan BPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengukuran dalam Metode BPK tersebut menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan audit keuangan dan audit kinerja. Dari hasil

penilaian BPK tersebut telah dihasilkan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Setjen Wantannas Tahun 2013 untuk tahun periksa tahun 2012.

Di samping itu, untuk menjaga kualitas (*quality assurance*) penyusunan laporan keuangan juga dilakukan *review* secara berkala (Semester dan Tahunan) oleh Tim Pengawas Internal atas penyiapan laporan Keuangan Setjen Wantannas serta pendampingan selama proses audit dalam mendorong rencana aksi penyelesaian rekomendasi pemeriksaan (salah satunya penyelesaian temuan terkait pencatatan aset) sebagai pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategis Rencana Aksi mempertahankan Opini Laporan Keuangan.

Tidak ada yang dapat menjamin bahwa opini WTP dari BPK dapat terus dicapai dan dipertahankan, tanpa adanya upaya yang sungguh-sungguh dan nyata untuk terus melakukan perbaikan proses manajemen dan peningkatan mutu laporan keuangan serta menindaklanjuti temuan BPK atas kelemahan-kelemahan yang ada. Pada tahun-tahun tercapainya opini WTP atas laporan keuangan Setjen Wantannas, telah dilaksanakan berbagai aktivitas untuk mendukung upaya mempertahankan opini WTP yang secara terus-menerus dan berlanjut dilakukan sampai dengan saat ini. Tahap-tahap aktivitas tersebut adalah sebagai berikut: (1) Identifikasi titik kritis/permasalahan yang akan menghambat pencapaian opini laporan keuangan “WTP”; (2) Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK; (3) Monitoring dan evaluasi atas perbaikan; (4) Pelaksanaan *Quality Assurance* dan (5) Pendampingan atas pemeriksaan BPK.

- b. Indikator kedua adalah nilai hasil evaluasi KemenPAN&RB terhadap pelaksanaan kinerja Setjen Wantannas atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Nilai hasil evaluasi KemenPAN&RB terhadap pelaksanaan kinerja Setjen Wantannas yang diterima tahun 2014 adalah CC untuk pelaksanaan kinerja Setjen Wantannas tahun 2013 dari target CC yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kinerja Setjen Wantannas pada tahun 2014 telah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari menguatnya

pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja, yang ditandai dengan dilaksanakannya berbagai tahapan perencanaan strategis. Tahapan tersebut dimulai dari penetapan Rencana Kinerja Tahunan, baik tingkat lembaga maupun unit kerja di lingkungan Setjen Wantannas, yang selanjutnya dibuat pernyataan kinerja oleh masing-masing pimpinan. Sebagaimana dalam Sistem AKIP, tahapan selanjutnya adalah pelaporan atas pengukuran kinerja oleh masing-masing pimpinan unit kerja telah dilaksanakan dengan baik, sehingga dalam penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada tingkat lembaga ini dapat dilaksanakan dengan baik dan obyektif.

Penilaian dari KemenPAN&RB merupakan salah satu indikator penilaian dari apa yang telah dicapai oleh Setjen Wantannas dalam melaksanakan kinerja selama tahun 2014. Penilaian ini dimulai dari aspek Perencanaan Kinerja yang telah ditetapkan oleh Setjen Wantannas terhadap apa yang akan dilakukan selama tahun berjalan (2014) dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Di sisi lain, Renstra Setjen Wantannas 2010-2014 telah dilakukan revisi pada tahun 2012 yang di dalamnya memuat indikator kinerja tujuan sebagai alat ukur keberhasilan organisasi, sebagai acuan rencana aksi pada tahun berjalan dituangkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja. Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan tidak hanya sebatas pada pencapaian target, namun juga mempertimbangan konsistensi indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, Renstra 2010-2014, Renja 2014, RKT 2014, dan Penetapan Kinerja 2014.

Implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Setjen Wantannas dilakukan dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Sebagai gambaran, pada tahun 2014 Setjen Wantannas telah menargetkan untuk memperoleh nilai "CC". Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2013, Setjen Wantannas mendapatkan predikat "CC" sesuai dengan target yang dikehendaki. Untuk itu momentum dari keberhasilan dalam pencapaian target pada tahun 2013 tersebut dapat menjadi pemicu semangat untuk memenuhi target yang akan datang, yakni peringkat capaian menjadi "B".

- c. Indikator ketiga adalah persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN telah tercapai sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan, yakni seluruh pejabat di lingkungan Wantannas telah menyerahkan LHKPN ke KPK.

Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara merupakan indikator yang ditetapkan sebagai salah satu pemicu keberhasilan kinerja Setjen Wantannas, karena dengan adanya pelaporan tersebut secara tidak langsung akan memperkuat sistem dan peningkatan kinerja untuk mempermudah pengawasan dalam hal KKN. Di samping itu, juga dalam rangka memenuhi permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi para pejabat yang memegang jabatan strategis dan potensial/rawan KKN di lingkungan Setjen Wantannas.

Setjen Wantannas telah melaksanakan kewajiban menyerahkan LHKPN oleh seluruh pejabat Eselon I, Eselon II dan pejabat pengelola keuangan, sehingga dari target yang direncanakan 100% telah tercapai secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan komitmen pimpinan di lingkungan Setjen Wantannas khususnya dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi. Namun demikian dalam rangka menjaga dan menguatkan komitmen akan budaya anti korupsi, Setjen Wantannas secara konsisten melaksanakan program percepatan pencegahan pemberantasan korupsi pada tahun-tahun berikutnya yang meliputi kegiatan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK), Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK), dan Zona Integritas.

- d. Indikator keempat adalah persentase dokumen program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu telah tercapai sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan, dengan seluruh dokumen dapat diselesaikan tuntas.

Dokumen program dan anggaran yang dihasilkan pada tahun 2014 meliputi dokumen Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, laporan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala, laporan keuangan secara berkala, laporan akuntabilitas kinerja,

dan dokumen program dan anggaran lainnya yang dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya. Sehingga dapat disimpulkan telah tercapai target yang direncanakan yaitu 100%.

- e. Indikator kelima adalah persentase unit kerja yang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan telah tercapai sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan, tanpa adanya kegiatan yang tertunda.

Pada tahun 2014 seluruh unit kerja telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagaimana laporan capaian kinerja kegiatan dengan pengukuran kinerja kegiatan yang tertuang dalam lampiran LAKIP ini pada seluruh unit kerja. Hal ini mencerminkan bahwa efektivitas kinerja pengawasan dan monitoring anggaran telah berjalan dengan baik, seiring dengan penguatan akuntabilitas kinerja menggunakan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), meskipun masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Kendala tersebut terkait dengan perencanaan strategik Setjen Wantannas yang masih memerlukan berbagai perbaikan, di antaranya: dokumen PK (Penetapan Kinerja) yang belum terstruktur, kualitas rumusan indikator kinerja belum memenuhi kriteria yang baik, pengukuran kinerja yang belum sepenuhnya digunakan dalam pengendalian dan pemantauan kinerja, serta hasil evaluasi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja.

Untuk itu, Setjen Wantannas tetap berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dan pelaporan, monitoring serta evaluasi anggaran secara berkala agar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, utamanya dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi. Berbagai upaya tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mengimplementasikan rencana aksi pencapaian kinerja sebagai alat monitoring pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja;
- 2) Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja, terutama di tingkat unit kerja agar dapat memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik sesuai ketentuan terbaru dalam penyusunannya;

- 3) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk pengendalian dan pemantauan anggaran secara berkala;
- 4) Menyempurnakan sistem monitoring dan evaluasi anggaran dalam rangka analisis pencapaian sasaran strategis dan perbandingan data kinerja kegiatan; dan
- 5) Memanfaatkan informasi kinerja kegiatan dan hasil evaluasi internal untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dan kinerja Setjen Wantannas secara keseluruhan; serta
- 6) Meningkatkan kapasitas SDM pelaksanaan kegiatan melalui pendidikan manajemen kinerja di seluruh jajaran Setjen Wantannas.

### **C. Akuntabilitas Keuangan**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, pada tahun 2014 Setjen Wantannas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp31.049.505.000,- (tiga puluh satu miliar enam empat puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah), namun dengan adanya kebijakan Pemerintah dalam rangka penghematan APBN maka terjadi perubahan pagu anggaran menjadi Rp27.456.304.000,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat ribu rupiah) dan mendapatkan alokasi dari BA-BUN dalam rangka pembayaran tunjangan kinerja sehingga pagu anggaran menjadi Rp38.659.320.000,- (tiga puluh delapan miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Realisasi anggaran keseluruhan pada per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 38.093.786.692,- atau 98,54% dengan rincian:

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| - Belanja pegawai     | Rp17.460.076.637,- (97,62%) |
| - Belanja barang/jasa | Rp20.414.055.055,- (99,82%) |
| - Belanja modal       | Rp 219.655.000,- (99,78%)   |

Rincian realisasi penyerapan anggaran tahun 2014 yang dilaksanakan pada masing-masing program sebagaimana dijelaskan pada Tabel 10 dan Tabel 11 adalah sebagai berikut:

**TABEL 10.**  
**REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM**

PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	Rp14.204.659.000,-	Rp14.116.372.780,-	99,37%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas	Rp24.454.661.000,-	Rp23.977.413.912,-	98,05%
<b>TOTAL</b>	<b>Rp38.659.320.000,-</b>	<b>Rp38.093.786.692,-</b>	<b>98,54%</b>

**TABEL 11.**  
**AKUNTABILITAS KEUANGAN SETJEN WANTANNAS**

NO	PROGRAM	ANGGARAN		OUTPUT KEGIATAN
		PAGU	REALISASI	
1	<b>Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional</b>	Rp14.204.659.000,-	Rp14.116.372.780,-	Tersedianya bahan pengambilan keputusan untuk menetapkan kebijakan pembinaan ketahanan nasional yang diarahkan kepada bidang pertahanan ( <i>defence</i> ), keamanan ( <i>security</i> ), serta pencegahan dan penanggulangan krisis ( <i>crisis prevention and resolution</i> ), terdiri dari: 1. Terlaksananya penyelenggaraan perumusan kebijakan ketahanan nasional. 2. Tersedianya sistem teknologi informasi yang mampu menyajikan data secara cepat, akurat, aman dan lengkap
2	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>	Rp24.454.661.000,-	Rp23.977.413.912,-	Meningkatnya kelancaran pengelolaan dan kecukupan dukungan operasional pelaksanaan tugas Wantannas, yang terdiri melalui: 1. Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi keuangan 2. Meningkatnya kualitas

NO	PROGRAM	ANGGARAN		OUTPUT KEGIATAN
		PAGU	REALISASI	
				pelayanan persidangan dan humas 3. Meningkatnya pelayanan pengelolaan tata usaha dan rumga 4. Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian 5. Meningkatnya pelayanan pengelolaan asset, sarana dan prasarana

### 1. Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional

Sasaran Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional adalah tersedianya bahan pengambilan keputusan untuk menetapkan kebijakan pembinaan ketahanan nasional yang diarahkan kepada bidang pertahanan (*defence*), keamanan (*security*), serta pencegahan dan penanggulangan krisis (*crisis prevention and resolution*). Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun anggaran 2014 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp14.204.659.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp14.116.372.780,- (99,37%).

Anggaran Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional ini dikelola oleh 1 (satu) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan 1 (satu) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan di lingkungan kedeputian antara lain:

- a. Terlaksananya pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan sistem nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.
- b. Terlaksananya pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan peluang, kendala, serta kecenderungan lingkungan strategis dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.
- c. Terlaksananya pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan politik, strategi dan rencana kontijensi dalam rangka menghadapi krisis nasional.
- d. Terlaksananya pengamatan, evaluasi, analisis dinamika atas pengembangan segenap aspek kehidupan dan pelaksanaan

pembangunan serta pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional.

Dengan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional ini, pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Setjen Wantannas tahun 2014 telah sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan, yakni terlaksananya setiap kegiatan yang dirancang.

## 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas adalah untuk meningkatkan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas Setjen Wantannas, yang pada tahun 2014 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp24.454.661.000,-, untuk melaksanakan kegiatan antara lain:

- a. Penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi keuangan
- b. Pelayanan persidangan dan humas
- c. Pelayanan pengelolaan tata usaha dan rumah tangga
- d. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
- e. Pelayanan pengelolaan asset, sarana dan prasarana

Dengan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas ini, pencapaian target indikator kinerja utama Setjen Wantannas tahun 2014 telah sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan, yakni hampir seluruh kegiatan yang direncanakan.

Penjelasan per pos Mata Anggaran dari realisasi anggaran sebagaimana dijelaskan pada Tabel 12 adalah sebagai berikut:

**TABEL 12.**  
**REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2014**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
1	<b>Realisasi Pendapatan Negara</b>	-	<b>Rp151.514.417,-</b>	-
	Penerimaan Pajak	-	-	-
	PNBP	-	Rp151.514.417,-	-
	Penerimaan Hibah	-	-	-

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
2	<b>Realisasi Belanja Negara</b>	<b>Rp38.659.320.000,-</b>	<b>Rp38.093.786.692,-</b>	<b>98,54</b>
	<b>A. Rupiah Murni</b>			
	Belanja Pegawai	Rp17.885.770.000,-	Rp17.460.076.637,-	98,65
	Belanja Barang	Rp20.553.405.000,-	Rp20.414.055.055,-	99,32
	Belanja Modal	Rp220.145.000,-	Rp219.655.500,-	99,78
	<b>B. Pinjaman dan Hibah</b>			
	Belanja Barang	Rp500.000.000,-	Rp500.000.000,-	100,00

## 1. Realisasi Pendapatan Negara

### ➤ Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara Setjen Wantannas per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 151.514.417,- yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan kembali belanja lainnya TAYL sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2013.

### ➤ Penerimaan Negara Bukan Pajak

Setjen Wantannas tidak memiliki pagu anggaran PNBPN dari layanan maupun Bendahara Penerimaan, karena itu tidak ada alokasi anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pencatatan PNBPN yang ada di Setjen Wantannas bukan berasal dari hasil penerimaan kas/bendahara penerimaan tetapi merupakan PNBPN yang berasal dari penerimaan kembali belanja lainnya TAYL sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 151.514.417,-.

## 2. Realisasi Belanja Negara

Realisasi belanja negara Setjen Wantannas per 31 Desember 2014 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja adalah sebesar Rp38.093.786.692 (98,54%) Realisasi belanja Setjen Wantannas mengalami kenaikan sebesar 2,44% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### ➤ Belanja Pegawai

Pagu Anggaran Belanja Pegawai Setjen Wantannas tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp17.885.770.000,- dengan nilai realisasi belanja pegawai sebesar Rp17.460.076.637,- atau sebesar 97,62%.

➤ **Belanja Barang**

Pagu Anggaran Belanja Barang Setjen Wantannas tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp20.553.405.000,- dengan nilai realisasi belanja barang sebesar Rp20.414.055.055,- atau sebesar 99,32%.

➤ **Belanja Modal**

Pagu Anggaran Belanja Modal Setjen Wantannas tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp 220.145.000,- dengan nilai realisasi belanja modal sebesar Rp 219.655.000,- atau sebesar 99,78%.

Dengan demikian, realisasi secara keseluruhan anggaran pada Tahun 2014 tercapai sebesar 98,54%.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Ketahanan Nasional merupakan salah satu upaya yang dilakukan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) dalam mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Setjen Wantannas yang merupakan wujud pertanggungjawaban kepada Presiden RI dan masyarakat (publik).

Sejalan dengan sasaran dan tujuan organisasi Setjen Wantannas yang telah ditetapkan, dan berdasarkan penetapan kinerja tahun 2014 telah terealisasi pencapaiannya dengan lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan seluruh realisasi yang dicapai dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian target kinerja tahun 2014 menjadi bahan untuk terus meningkatkan kualitas pencapaian kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang.

Sebagai upaya peningkatan kinerja Setjen Wantannas dalam rangka menjadi lembaga yang sangat strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan peran Setjen Wantannas dalam memberikan saran tindak kepada Presiden R.I. selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional dalam merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis nasional, regional dan global dalam penyusunan perencanaan strategis termasuk penentuan sasaran atau target-target yang lebih khas, terukur, realistis, dapat dicapai sesuai jadwal yang ditetapkan SMART (*specific, measurable, achievable, realistic and timebound*)
- 2) Terus melanjutkan program Reformasi Birokrasi dengan fokus dan konsisten pada pengembangan organisasi dan peningkatan kompetensi SDM Setjen Wantannas agar dapat cepat tanggap dalam memprediksi atau mendeteksi dini (*early warning system*) terhadap perubahan lingkungan strategis nasional, regional maupun global sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah

antisipatif dalam memecahkan persoalan ketahanan nasional Republik Indonesia.

Demikian Laporan Kinerja Setjen Wantannas Tahun 2014, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Setjen Wantannas sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Republik Indonesia.

Jakarta, 26 Februari 2015

Sekretaris Jenderal  
Dewan Ketahanan Nasional



Waris  
Letnan Jenderal TNI



**LAMPIRAN I**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**TAHUN 2014**



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
NOMOR : Kep- 65/Sesjen/X/2013**

**TENTANG**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2014  
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional untuk tahun anggaran 2014, perlu landasan dan pedoman agar dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2014.
- Mengingat** :
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
  4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
  5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  7. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2010 – 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2014.
- KESATU : Mengesahkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2014 ini akan diputuskan lebih lanjut.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Oktober 2013



SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

WARIS  
LETNAN JENDERAL TNI



**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
NOMOR : Kep- 65 /Sesjen/X/2013**

**TENTANG**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
TAHUN 2014**

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, di mana salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sebagaimana Rencana Strategis Dewan Ketahanan Nasional 2010-2014 yang mengacu pada Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 disebutkan bahwa target Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagai salah satu instansi dalam lingkup Pembangunan Bidang Pertahanan Keamanan dengan fokus prioritas: peningkatan kapasitas penyusunan Kebijakan Lembaga Keamanan Nasional, prioritas bidang: peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional, dengan indikator impact: peningkatan efektifitas pengelolaan keamanan nasional.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2014 merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2010 – 2014, dan mengacu juga pada Perpres Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014. Sehingga RKT Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2014 memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tahun 2014.

Pada tahun 2014, sasaran yang menjadi kewenangan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional adalah: Terlaksananya transformasi penentu kebijakan Ketahanan Nasional dalam rangka meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan nasional yang terintegrasi, tepat sasaran, dan tepat waktu; Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas akan berdampak pada presisi keputusan pimpinan negara dalam menyikapi dinamika sosial, politik, ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan. Dengan disusunnya RKT Tahun 2014 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2014 dan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang pertahanan keamanan.

Jakarta, 2 Oktober 2013

Sekretaris Jenderal

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
C. Dasar Hukum.....	2
<b>BAB II ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SETJEN WANTANNAS 2014 .....</b>	<b>3</b>
A. Visi dan Misi Setjen Wantannas 2010-2014 .....	3
B. Tujuan dan Target Setjen Wantannas 2010-2014 .....	3
C. Arah Kebijakan dan Strategi Setjen Wantannas .....	4
D. Sasaran Pembangunan Setjen Wantannas 2014 .....	5
E. Kebijakan Pembangunan Setjen Wantannas 2014 .....	8
<b>BAB III PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2014.....</b>	<b>10</b>
A. Program Pembangunan Tahun 2014.....	10
B. Rancangan Program dan Kegiatan Setjen Wantannas 2014 .....	10
C. Rencana Kerja dan Anggaran Setjen Wantannas 2014 .....	12
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>19</b>
<b>FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN .....</b>	<b>20</b>
Formulir RKT Kedeputian Sistem Nasional	
Formulir RKT Kedeputian Politik dan Strategi	
Formulir RKT Kedeputian Jiandra	
Formulir RKT Kedeputian Pengembangan	
Formulir RKT Biro Keuangan	
Formulir RKT Biro Umum	
Formulir RKT Biro Persidangan dan Humas	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rencana pembangunan nasional tahap kedua pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu telah memasuki tahun terakhir pelaksanaan. Pemerintah secara konsisten terus melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan yang telah direncanakan sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Dokumen RPJMN 2010-2014 merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden terpilih yang memuat Strategi Pembangunan Nasional, Kebijakan Umum, Prioritas Nasional dan Program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Dokumen ini menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kerjanya.

Kedudukan Setjen Wantannas sebagai lembaga pemerintah berbeda dengan Kementerian/LPNK, dalam arti Setjen Wantannas melakukan pelayanan staf pada Ketua Wantannas bukan merupakan lembaga yang bersifat pelayanan publik. Setjen Wantannas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya lebih terfokus kepada pelaksanaan pemberian saran tindak kepada Presiden RI terkait telaahan berbagai masalah nasional krusial mendesak yang bersifat strategis pada aspek "*Defence, security, crisis prevention and resolution* yang diwujudkan dalam bentuk *day to day report, incidental report* dan *emergency report* serta berbagai telaahan strategis dan sumbangan bahan penetapan kebijakan/saran tindak untuk dibahas dalam sidang Dewan Ketahanan Nasional atau langsung menjadi bahan pengambilan keputusan Ketua Dewan Ketahanan Nasional tanpa harus melalui sidang pleno (bukan konsumsi publik).

Selanjutnya sebagai penjabaran RPJM 2010-2014 dan pelaksanaan Rencana Strategis Setjen Wantannas tahun 2010-2014 maka perlu disusun Rencana Kinerja Tahunan Setjen Wantannas tahun 2014 sebagai landasan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran dan kegiatan tahun anggaran 2014.

### **B. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2014 adalah memberikan gambaran dan arahan tentang sasaran, kegiatan dan kemampuan dukungan anggaran yang tersedia.

#### **2. Tujuan**

Agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

### **C. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RKT Setjen Wantannas Tahun 2014 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2010 – 2014.

**BAB II**  
**ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**  
**SETJEN WANTANNAS 2014**

**A. Visi dan Misi Setjen Wantannas 2010-2014**

**1. Visi**

Menjadikan badan fasilitas staf bagi Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), yang mampu memenuhi kebutuhan Ketua Wantannas dalam menyiapkan pilihan keputusan secara komprehensif integral tentang *defence, security, crisis prevention* dan *resolution* serta arahan-arahan lain dari Presiden dalam merespon dinamika kehidupan nasional.

**2. Misi**

- a. Menyediakan *optional decision* yang operasional dalam seluruh aspek kehidupan nasional yang terkait erat dengan ancaman tradisional dan non tradisional.
- b. Mengintegrasikan berbagai pemikiran dari jalur aspiratif, akademik, dan empirik secara komprehensif integral melalui proses lintas sektoral, lintas fungsional, dan lintas disiplin ilmu.
- c. Menyediakan *day to day report* berisi saran pengambil keputusan cepat menghadapi dinamika kehidupan nasional yang berubah serba cepat.
- d. Menyediakan informasi akurat, terpercaya, cepat melalui sistem informasi Setjen Wantannas yang *compatible* dengan sistem informasi K/LPNK dan sistem informasi pemerintah daerah.
- e. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan direktif Presiden selaku Ketua Wantannas kepada seluruh K/LPNK, Pemda Provinsi, Kab/Kota, serta kemungkinan risiko yang dihadapi.
- f. Memelihara seluruh sumber daya dan instrumen kelembagaan Setjen Wantannas untuk mendukung kelancaran tupoksi.

**B. Tujuan dan Target Setjen Wantannas 2010-2014**

Tujuan yang ingin dicapai Setjen Wantannas:

1. Tersedianya *optional decision* yang operasional dalam seluruh aspek kehidupan nasional yang terkait erat dengan ancaman tradisional dan non tradisional, untuk setiap tahun anggaran berjalan ditetapkan topik-topik/isu-isu strategis yang diperkirakan timbul berdasarkan analisis/telaahan strategis.
2. Tersedianya *day to day report* berisi saran pengambil keputusan cepat menghadapi dinamika kehidupan nasional yang berubah serba cepat, dilakukan melalui monitoring dan evaluasi setiap hari memanfaatkan fasilitas sistem informasi Setjen Wantannas yang ada dan diawasi secara

bergantian oleh pejabat pemikir dan pendukung sesuai dengan surat perintah Setjen Wantannas

3. Tersedianya informasi akurat, terpercaya, cepat melalui sistem informasi Setjen Wantannas yang *compatible* dengan sistem informasi K/LPNK dan sistem informasi pemerintah daerah, idem dilaksanakan sesuai butir 2 di atas.
4. Terlaksananya monitoring terhadap pelaksanaan direktif Presiden selaku Ketua Wantannas kepada seluruh K/LPNK, Pemda Provinsi, Kab/kota, serta kemungkinan risiko yang dihadapi, idem dilaksanakan sesuai butir 2 di atas.
5. Terpeliharanya seluruh sumber daya dan instrumen kelembagaan Setjen Wantannas untuk mendukung kelancaran tupoksi, dijabarkan melalui program pembinaan organisasi (personel, materiil, pendidikan-pelatihan, perkantoran, administrasi) dan pembinaan fungsi.

Selama satu tahun ke depan, dalam membangun ketahanan nasional, target Setjen Wantannas adalah:

1. Terumuskannya dokumen Kirstranas;
2. Terumuskannya dokumen Telstranas;
3. Terumuskannya dokumen Apstranas;
4. Terumuskannya dokumen Renkonnas;
5. Terumuskannya saran tindak pemecahan masalah krusial mendesak;
6. Terumuskannya saran tindak perkiraan cepat, dan;
7. Terumuskannya Kajian Kewilayahan.

### **C. Arah Kebijakan dan Strategi Setjen Wantannas**

Setjen Wantannas dalam waktu 2010-2014, telah menetapkan 7 arah kebijakan ketahanan nasional, meliputi:

1. Meningkatkan kapasitas penyediaan bahan perumusan kebijakan nasional yang berkaitan dengan upaya pembinaan ketahanan nasional menyangkut bidang keamanan internal, keamanan eksternal maupun menghadapi kemungkinan dan upaya mengatasi akibat bencana berskala besar;
2. Menyelenggarakan perumusan kebijakan strategis dan pemantauan serta penilaian seluruh aspek kehidupan nasional tahun anggaran berjalan dan perkiraan kecenderungannya pada jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang dalam rangka menyusun sumbangan bahan untuk pemecahan masalah nasional krusial mendesak dan pembinaan ketahanan nasional selama tahun anggaran berjalan;
3. Mengoptimalkan dan mengembangkan kapasitas lembaga agar senantiasa mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas Setjen Wantannas selama tahun anggaran berjalan;

4. Peningkatan kualitas pelayanan sistem informasi untuk mendukung perumusan kebijakan keamanan internal, keamanan eksternal dan penanganan bencana berskala besar;
5. Melaksanakan studi kebijakan melalui pengkajian daerah dalam rangka memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan;
6. Melaksanakan pengembangan hubungan kerjasama pengkajian dengan perguruan tinggi untuk memperoleh masukan penyelesaian suatu masalah Ketahanan Nasional secara akademik;
7. Melaksanakan kajian Luar Negeri ke beberapa negara yang memiliki lembaga *National Security Council* semacam Dewan Keamanan Nasional dalam rangka pengembangan organisasi Wantannas.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Wantannas ditempuh langkah-langkah strategi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebagaimana telah dialokasikan melalui RKA-KL TAB secara efektif dan efisien meliputi:
  - a. Perencanaan Program dan Pengelolaan Administrasi Keuangan termasuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan personel sesuai dengan hak anggota berdasarkan jabatan, kepangkatan dan kelas jabatan kinerja;
  - b. Pelayanan Persidangan dan Hubungan Masyarakat;
  - c. Pelayanan Tata usaha dan Administrasi Umum;
  - d. Pembinaan Administrasi Kepegawaian Wantannas;
  - e. Pengelolaan Asset Wantannas.
2. Menyelenggarakan Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional, melalui telaahan kajian berbagai dinamika aspek kehidupan nasional ditinjau dari aspek bidang sistem nasional, bidang politik dan strategi, bidang pengkajian dan penginderaan, dan bidang pengembangan serta pemutakhiran sistem informasi Wantannas.

#### **D. Sasaran Pembangunan Setjen Wantannas 2014**

Sasaran pembangunan kewenangan Wantannas sesuai dengan Perpres Nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010-2014 adalah: Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan nasional dibidang keamanan nasional yang terintergrasi, tepat sasaran, dan tepat waktu; Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan akan dampak pada efektifitas keputusan kebijakan nasional dalam menyikapi dinamika ideologi, politik ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Sasaran pembangunan kewenangan Wantannas sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2013 tentang RKP tahun 2014 adalah: Terlaksananya transformasi penentu kebijakan Ketahanan Nasional dalam rangka meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan nasional yang terintegrasi, tepat sasaran, dan

tepat waktu; Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas akan berdampak pada presisi keputusan pimpinan negara dalam menyikapi dinamika sosial, politik, ekonomi, hukum, dan pertahanan dan keamanan.

Sesuai dengan sasaran jangka menengah dan tahunan tersebut diatas, maka sasaran yang ingin dicapai Setjen Wantannas Tahun 2014 adalah:

### **1. Biro Keuangan**

Sasaran yang ingin dicapai Biro Keuangan pada Tahun Anggaran 2014 adalah terselenggaranya perencanaan anggaran dan administrasi keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas melalui upaya pembinaan anggaran dan keuangan sebagai berikut :

- a. Bagian Perencanaan Anggaran
  - 1) Terselenggaranya penyusunan rencana program dan anggaran;
  - 2) Terselenggaranya pengawasan dan evaluasi program dan anggaran.
- b. Bagian Administrasi Keuangan
  - 1) Terselenggaranya tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan;
  - 2) Tersusunnya laporan keuangan Setjen Wantannas.

### **2. Biro Persidangan dan Humas**

Sasaran yang ingin dicapai pada Biro Persidangan dan Humas pada Tahun Anggaran 2014 adalah: (1) Terselenggaranya pengelolaan persidangan dan kehumasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Setjen Wantannas; (2) Terselenggaranya pengelolaan rapat koordinasi sidang Wantannas; dan (3) terselenggaranya pengelolaan jalur komunikasi data yang aman dan mutakhir dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Setjen Wantannas, melalui upaya sebagai berikut:

- a. Bagian Persidangan
  - 1) Terselenggaranya pengelolaan dan penatausahaan layanan persidangan;
  - 2) Tersedianya bahan/materi hasil sidang yang telah diselenggarakan.
- b. Bagian Hubungan Masyarakat
  - 1) Terselenggaranya pengelolaan dan penatausahaan layanan kehumasan;
  - 2) Terlaksananya dukungan kegiatan hubungan media, hubungan lembaga dan publikasi;
  - 3) Terlaksananya dukungan kegiatan kearsipan, perpustakaan dan info media;

- 4) Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur sisfo Setjen Wantannas.

### **3. Biro Umum**

Sasaran yang ingin dicapai Biro Umum pada Tahun Anggaran 2014 adalah terlaksananya penyelenggaraan administrasi kepegawaian, kerumah-tanggaan dan administrasi umum melalui upaya sebagai berikut:

- a. Bagian Kepegawaian
  - 1) Terpenuhinya Daftar Susunan Personel (DSP);
  - 2) Terwujudnya penilaian dan peningkatan kemampuan SDM;
  - 3) Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian;
  - 4) Terselenggaranya pengelolaan tata naskah kepegawaian dan dokumen kepegawaian;
  - 5) Terwujudnya tingkat disiplin pegawai;
  - 6) Terwujudnya data personil yang mutakhir dan valid.
- b. Bagian Rumah Tangga
  - 1) Terpenuhinya dukungan operasional perkantoran dan pemeliharaan asset;
  - 2) Terselenggaranya pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang transparan dan akuntabel;
  - 3) Terselenggaranya pengelolaan dan penatausahaan belanja pegawai.
- c. Bagian Administrasi Umum
  - 1) Terselenggaranya pengelolaan administrasi persuratan dan ekspedisi;
  - 2) Terlaksananya dukungan tata usaha pimpinan dan kesekretariatan.

### **4. Deputi Sistem Nasional**

Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2014 adalah terselenggaranya kajian Dinamis secara komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang dilakukan melalui pengamatan, evaluasi, analisis dan perumusan sistem nasional serta penjabarannya ke dalam sub-sub sistemnya dalam rangka pembinaan ketahanan nasional sebagai bahan masukan kebijakan nasional kepada Presiden RI selaku Ketua Wantannas.

### **5. Deputi Politik dan Strategi**

Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2014 adalah terselenggaranya kajian Siklis maupun Dinamis secara komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang

dilakukan melalui pengamatan, evaluasi, analisis dan perumusan politik strategi nasional serta rencana kontijensi.

#### **6. Deputi Pengkajian dan Penginderaan**

Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2014 adalah terselenggaranya kajian Siklis maupun Dinamis secara komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas yang dilakukan melalui pengkajian dan penginderaan strategis nasional, regional, dan internasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional sebagai masukan dan saran tindak kepada Ketua Wantannas (Presiden RI).

#### **7. Deputi Pengembangan**

Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2014 adalah terselenggaranya kajian Dinamis secara komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang dilakukan melalui pengamatan, evaluasi, analisis dinamika segenap aspek kehidupan nasional dan pelaksanaan pembangunan nasional serta perumusan saran pemecahan krisis dan saran pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional yang terjadi.

#### **8. Perumusan kegiatan dan koordinasi Setjen Wantannas**

Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2014 adalah terselenggaranya rapat koordinasi sidang dewan, reformasi birokrasi, dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (stranas PPK), serta kajian kewilayahan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang dilakukan melalui pengamatan, evaluasi, analisis dinamika segenap aspek kehidupan nasional dan pelaksanaan pembangunan nasional pada suatu daerah maupun negara lain dalam rangka pembinaan ketahanan nasional sebagai masukan dan saran tindak kepada Ketua Wantannas (Presiden RI).

### **E. Kebijakan Pembangunan Setjen Wantannas 2014**

Kebijakan pembangunan Setjen Wantannas tahun 2014 dirancang sebagai bagian dan keberlanjutan dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Selain itu tentu saja kebijakan tersebut merupakan komponen dari RKP 2014, khususnya dalam menunjang salah satu prioritas pembangunan nasional, yaitu prioritas nomor enam berupa Peningkatan Kualitas Kebijakan Keamanan Nasional dalam kerangka pembangunan jangka menengah.

Berbagai kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan Setjen Wantannas tahun 2014 adalah:

1. Mengerahkan seluruh komponen kekuatan Setjen Wantannas khususnya personel pemikir untuk melakukan telaahan baik yang bersifat siklis maupun dinamis disesuaikan dengan dinamika seluruh aspek kehidupan nasional.
2. Mengarahkan seluruh komponen kekuatan Setjen Wantannas agar mampu mengembangkan inisiatif, kemudahan untuk memperoleh akses peningkatan kapasitasnya, dan penguatan tupoksi yang bersangkutan.

3. Mengarahkan penguatan jejaring kepakaran melalui komunikasi konstruktif dan kemitraan strategis dengan para pakar yang mewakili jalur aspiratif (anggota DPR, LSM terpilih, pengamat/pemerhati), jalur akademik (para ilmuwan) dan jalur empirik (birokrat terpilih).
4. Mengarahkan seluruh sumber daya Setjen Wantannas agar mampu menunjang berbagai program kegiatan yang telah dirancang Renstra dan RKT secara efektif dan efisien.

## BAB III

### PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2014

#### A. Program Pembangunan Tahun 2014

Prioritas pembangunan bidang pertahanan keamanan yang menjadi kewenangan Setjen Wantannas adalah peningkatan kapasitas penyusunan lembaga keamanan nasional, merupakan kumpulan dari kegiatan kegiatan yang dirancang dalam program untuk mencapai sasaran tertentu atau beberapa sasaran sekaligus. Program tersebut tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Hal ini dalam rangka harmonisasi/ keselarasan mulai dari RPJM, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja.

Sesuai amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, disebutkan bahwa program merupakan tanggung jawab unit Eselon-I dan dalam bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja di lingkungannya. Program menghasilkan *outcome*. Sedangkan kegiatan menghasilkan output yang mendukung pencapaian *outcome* program.

Setjen Wantannas pada tahun 2014 melaksanakan 2 Program Pembangunan Ketahanan Nasional. Masing-masing program pembangunan ketahanan nasional tersebut mencerminkan tugas pokok dan fungsi dari 4 unit Eselon-I lingkup Kedeputian Setjen Wantannas, dan 3 Unit Eselon II lingkup Kebiroan Setjen Wantannas. Ukuran keberhasilan Eselon-I lingkup kedeputian dalam menjalankan program tersebut diukur kinerjanya dalam bentuk *outcome*. Sebagaimana diketahui bahwa *outcome* merupakan hasil dari *output* kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja di bawahnya (eselon-II). Adapun 2 Program Pembangunan Ketahanan Nasional Tahun 2014 disajikan pada Tabel A.

**Tabel A. Program Pembangunan Setjen Wantannas Tahun 2014**

No.	Nama Program
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2	Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional

#### B. Rancangan Program dan Kegiatan Setjen Wantannas 2014

Program pembangunan ketahanan nasional dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Pada masing-masing kegiatan dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I dan Eselon II sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kinerja keberhasilan unit kerja Eselon I, Eselon II dan unit kerja mandiri dalam melaksanakan kegiatan diukur dalam bentuk *output*. Penjabaran 2 program ke dalam 7 kegiatan, 7 Output, dan 5 sub output secara rinci disajikan pada Tabel B.

**Tabel B. Rancangan Program dan Kegiatan Setjen Wantannas Tahun 2014**

<b>No.</b>	<b>Program/Kegiatan/Output/Suboutput</b>
<b>1.</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>
1.1	Perencanaan Program dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
1.2.	Pelayanan Persidangan dan Hubungan Masyarakat
1.3.	Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Umum
1.4.	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Wantannas
1.5	Pengelolaan Asset Wantannas
<b>2.</b>	<b>Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional</b>
2.1.	Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional
2.1.1	Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional
2.1.1.1	Perumusan Kebijakan Kedeputian Sistem Nasional
2.1.1.2	Perumusan Kebijakan Kedeputian Politik dan Strategi
2.1.1.3	Perumusan Kebijakan Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan
2.1.1.2	Perumusan Kebijakan Kedeputian Pengembangan
2.1.1.2	Perumusan Kegiatan dan Koordinasi Setjen Wantannas
2.2.	Pengembangan Sistem Informasi Wantannas

## **C. Rencana Kerja dan Anggaran Setjen Wantannas 2014**

### **1. Rencana Kerja**

#### **a. Biro Keuangan**

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Biro Keuangan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Bagian Perencanaan Anggaran
  - a) Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah;
  - b) Melaksanakan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;
  - c) Melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja;
  - d) Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
  - e) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi program;
  - f) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi anggaran;
  - g) Melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 2) Bagian Administrasi Keuangan
  - a) Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan;
  - b) Melaksanakan verifikasi dokumen keuangan;
  - c) Melaksanakan pengarsipan dokumen keuangan;
  - d) Menyusun laporan keuangan semester dan tahunan;
  - e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan.

#### **b. Biro Persidangan dan Humas**

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Biro Persidangan dan Humas melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Bagian Persidangan
  - a) Menyusun rencana kinerja layanan persidangan;
  - b) Melaksanakan pelayanan persidangan;
  - c) Melaksanakan kegiatan produksi dan reproduksi;
  - d) Melaksanakan layanan rapat koordinasi dengan anggota tetap Wantannas;
  - e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan persidangan.
- 2) Bagian Hubungan Masyarakat
  - a) Menyusun rencana kinerja layanan kehumasan;

- b) Melaksanakan pengelolaan hubungan media dan hubungan lembaga;
- c) Melaksanakan pengelolaan bahan publikasi;
- d) Melaksanakan pengelolaan penerjemahan;
- e) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur sisfo Setjen Wantannas yang meliputi aplikasi, *software*, dan *hardware* jalur komunikasi data;
- f) Melaksanakan kegiatan dan koordinasi pada forum Bakohumas;
- g) Melaksanakan penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Setjen Wantannas;
- h) Melaksanakan pengelolaan arsip Setjen Wantannas;
- i) Melaksanakan kegiatan fotografi dan videografi;
- j) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, serta pendayagunaan bahan pustaka;
- k) Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan kehumasan.

**c. Biro Umum**

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Biro Umum melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Bagian Kepegawaian
  - a) Melaksanakan pengadaan pegawai melalui mutasi jabatan dari lintas Kementerian/Lembaga;
  - b) Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai mekanisme dan prosedur meliputi kenaikan pangkat, pensiun, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, cuti, pengusulan tanda penghargaan, absensi dan pembuatan kartu terkait pegawai serta pelantikan pejabat struktural;
  - c) Melaksanakan pengelolaan tata naskah kepegawaian dan dokumen kepegawaian sesuai dengan mekanisme dan prosedur;
  - d) Melaksanakan pemutakhiran data pegawai dan verifikasi data;
  - e) Melaksanakan pengiriman personil untuk mengikuti diklat struktural (Pim Tk.II 1 orang & Pim Tk.IV 2 orang) dan diklat teknis (17 orang);
  - f) Melaksanakan *Assesment Test* untuk promosi ke Eselon IV (5 orang);
  - g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan kepegawaian.

- 2) Bagian Rumah Tangga
  - a) Melaksanakan pembinaan pengadaan barang/jasa;
  - b) Melaksanakan pengadministrasian BMN dan barang persediaan;
  - c) Melaksanakan belanja modal yang terdiri dari pengadaan peralatan pendukung kinerja;
  - d) Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor tempat kerja, kendaraan dinas dan peralatan kantor lainnya;
  - e) Mengadakan obat-obatan untuk poliklinik Wantannas;
  - f) Mengadakan pakaian dinas pegawai;
  - g) Mengadakan pakaian kerja tenaga keamanan, kebersihan, pramubakti dan pengemudi;
  - h) Melaksanakan pembayaran belanja pegawai dan tenaga honorer (keamanan, kebersihan, pramubakti dan pengemudi);
  - i) Melaksanakan pembayaran langganan daya dan jasa;
  - j) Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan kerumahtanggaan.
- 3) Bagian Administrasi Umum
  - a) Menyelenggarakan kegiatan naskah dinas persuratan;
  - b) Mengelola arsip yang meliputi perawatan dan pemeliharaan arsip;
  - c) Melaksanakan pengawasan kegiatan tata naskah dinas persuratan;
  - d) Melaksanakan dukungan operasional pimpinan/ketua lembaga;
  - e) Melaksanakan dukungan kesekretariatan;
  - f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan administrasi umum.

**d. Deputi Sistem Nasional**

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kedeputian Sistem Nasional melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data, identifikasi masalah dan pembentukan Panitia Kerja

Melaksanakan pembentukan panitia kerja, merumuskan tema, dan menyusun Term of Reference (TOR) Kajian melalui pengumpulan data dan identifikasi masalah serta didukung dengan kegiatan pengkajian daerah (Kajida).

- 2) Penyusunan kajian, kirpat, dan semiloka bidang sistem nasional  
Melaksanakan penyusunan kajian bidang sistem nasional melalui kegiatan rapat kerja terbatas (Rakertas), penyusunan naskah perkiraan cepat (Kirpat) terkait masalah krusial mendesak, dan pelaksanaan seminar lokakarya (Semiloka) atas naskah kajian hasil kerjasama dengan mitra kerja.
- 3) Evaluasi dan pelaporan  
Melaksanakan rapat finalisasi naskah kajian melalui kegiatan rapat kelompok kerja khusus (Pokjasus) dan rapat permusan materi (Ramusmat).

**e. Deputi Politik dan Strategi**

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kedeputian Politik dan Strategi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data, identifikasi masalah dan pembentukan Panitia Kerja  
Melaksanakan pembentukan panitia kerja, merumuskan tema, dan menyusun Term of Reference (TOR) Kajian melalui pengumpulan data dan identifikasi masalah serta didukung dengan kegiatan pengkajian daerah (Kajida).
- 2) Penyusunan kajian, kirpat, dan semiloka bidang politik dan strategi  
Melaksanakan penyusunan kajian bidang politik dan strategi melalui kegiatan rapat kerja terbatas (Rakertas), penyusunan naskah perkiraan cepat (Kirpat) terkait masalah krusial mendesak, dan pelaksanaan seminar lokakarya (Semiloka) atas naskah kajian hasil kerjasama dengan mitra kerja.
- 3) Evaluasi dan pelaporan  
Melaksanakan rapat finalisasi naskah kajian melalui kegiatan rapat kelompok kerja khusus (Pokjasus) dan rapat permusan materi (Ramusmat).

**f. Deputi Pengkajian dan Penginderaan**

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data, identifikasi masalah dan pembentukan Panitia Kerja  
Melaksanakan pembentukan panitia kerja, merumuskan tema, dan menyusun Term of Reference (TOR) Kajian melalui pengumpulan data dan identifikasi masalah serta didukung dengan kegiatan pengkajian daerah (Kajida).

- 2) Penyusunan kajian, kirpat, dan semiloka bidang pengkajian dan penginderaan

Melaksanakan penyusunan kajian bidang pengkajian dan penginderaan melalui kegiatan rapat kerja terbatas (Rakertas), penyusunan naskah perkiraan cepat (Kirpat) terkait masalah krusial mendesak, dan pelaksanaan seminar lokakarya (Semiloka) atas naskah kajian hasil kerjasama dengan mitra kerja.

- 3) Evaluasi dan pelaporan

Melaksanakan rapat finalisasi naskah kajian melalui kegiatan rapat kelompok kerja khusus (Pokjasus) dan rapat permusan materi (Ramusmat).

#### **g. Deputi Pengembangan**

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kedeputian Pengembangan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data, identifikasi masalah dan pembentukan Panitia Kerja

Melaksanakan pembentukan panitia kerja, merumuskan tema, dan menyusun Term of Reference (TOR) Kajian melalui pengumpulan data dan identifikasi masalah serta didukung dengan kegiatan pengkajian daerah (Kajida).

- 2) Penyusunan kajian, kirpat, dan semiloka bidang pengembangan

Melaksanakan penyusunan kajian bidang pengembangan melalui kegiatan rapat kerja terbatas (Rakertas), penyusunan naskah perkiraan cepat (Kirpat) terkait masalah krusial mendesak, dan pelaksanaan seminar lokakarya (Semiloka) atas naskah kajian hasil kerjasama dengan mitra kerja.

- 3) Evaluasi dan pelaporan

Melaksanakan rapat finalisasi naskah kajian melalui kegiatan rapat kelompok kerja khusus (Pokjasus) dan rapat permusan materi (Ramusmat).

#### **h. Perumusan Kegiatan dan Koordinasi Setjen Wantannas**

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Setjen Wantannas melaksanakan perumusan kegiatan dan koordinasi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembentukan panitia kerja dalam rangka Rapat Koordinasi Wantannas, Reformasi Birokrasi dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- 2) Melaksanakan Rapat Koordinasi Wantannas, Kajian Kewilayahan, Seminar Nasional/Internasional, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi.

- 3) Melaksanakan rapat evaluasi dan pelaporan atas kegiatan Rapat Koordinasi Wantannas, Kajian Kewilayahan, Seminar Nasional/Internasional, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

**i. Pengembangan Sistem Informasi Wantannas**

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara cepat, akurat dan aman perlu didukung dengan sistem teknologi informasi yang handal, maka Setjen Wantannas melaksanakan pengembangan sistem informasi Wantannas melalui kegiatan pengembangan jaringan sistem informasi Wantannas.

**2. Rincian Rencana Kerja dan Anggaran**

Anggaran untuk pelaksanaan seluruh Rencana Kerja Setjen Wantannas TA. 2014 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar **Rp 31.049.505.000,-** (Tiga puluh satu milyar empat puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis belanja, terdiri dari :

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1) Belanja Pegawai                  | : Rp 7.182.754.000,-               |
| 2) Belanja Barang                   | : Rp 21.771.861.000,-              |
| - Belanja Barang Ops.               | : Rp 4.848.820.000,-               |
| - Belanja Brg Non Ops.              | : Rp 16.923.041.000,-              |
| 3) Belanja Modal                    | : <b><u>Rp 2.094.890.000,-</u></b> |
| <b>Jumlah : Rp 31.049.505.000,-</b> |                                    |

b. Berdasarkan jenis program :

**1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan**

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Tugas Teknis Lainnya Wantannas:</b> | <b>Rp 13.818.405.000,-</b> |
| a) Pengelolaan Gaji, Lembur & Honor    | Rp 7.182.754.000,-         |
| b) Penyusunan Rencana Kerja            | Rp 213.950.000,-           |
| c) Pelayanan Persidangan & Humas       | Rp 256.840.000,-           |
| d) Pelayanan Tata Usaha & Adminu       | Rp 936.510.000,-           |
| e) Pembinaan Adm. Kepegawaian          | Rp. 320.341.000,-          |
| f) Pengelolaan Asset Wantannas         | Rp. 4.908.010.000,-        |

**2) Program Pengembangan Kebijakan**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Ketahanan Nasional:</b>                | <b>Rp 17.231.100.000,-</b> |
| a) Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional | Rp 15.028.200.000,-        |

- |     |  |     |                 |
|-----|--|-----|-----------------|
| (1) | Perumusan Kebijakan Kedeputian<br>Sistem Nasional        | Rp  | 3.448.436.000,- |
| (2) | Perumusan Kebijakan Kedeputian<br>Politik dan Strategi   | Rp  | 3.358.801.000,- |
| (3) | Perumusan Kebijakan Kedeputian<br>Pengkajian Pengindraan | Rp  | 3.414.220.000,- |
| (4) | Perumusan Kebijakan Kedeputian<br>Pengembangan           | Rp  | 3.413.975.000,- |
| (5) | Perumusan Kegiatan dan Koordinasi<br>Wantannas           | Rp  | 1.392.768.000,- |
| b)  | Pengembangan Sisfo Wantannas                             | Rp. | 2.202.900.000,- |

## BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Setjen Wantannas Tahun 2014 yang berisi tentang detail sasaran, strategi pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun merupakan pedoman bagi unit-unit kerja Setjen Wantannas dalam menyelenggarakan pembangunan setjen Wantannas tahun 2014. Di samping itu dengan ditetapkannya indikator-indikator kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat diukur capaian kinerjanya sekaligus memudahkan untuk mengadakan evaluasi keberhasilan dan kegagalan.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan dari unit-unit kerja yang ada melalui pemantapan sistem dan metoda perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antara instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang dapat menjadikan kendala ataupun hambatan dapat disesuaikan dengan baik.

Jakarta, 2 Oktober 2013

Sekretaris Jenderal  
Dewan Ketahanan Nasional



Waris  
Letnan Jenderal TNI

## FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

Kementerian/Lembaga : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional  
Tahun : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas Setjen Wantannas	Opini BPK terhadap laporan keuangan Setjen Wantannas	WTP
	Nilai hasil evaluasi Kemen Pan & RB terhadap pelaksanaan kinerja Setjen Wantannas	CC
	Persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN	100 Persen
	Persentase dokumen program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen
	Persentase unit kerja yang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan	100 Persen
Tersedianya saran tindak kebijakan ketahanan nasional fokus pada bidang <i>defence, security, crisis prevention and resolution</i> secara komprehensif sebagai masukan Ketua Wantannas (Presiden RI)	Persentase saran tindak hasil kajian dinamis, siklus dan perkiraan cepat bidang kebijakan ketahanan nasional	100 Persen
	Persentase respon Presiden terhadap saran tindak Setjen Wantannas yang disampaikan kepada Presiden	80 Persen

Jakarta, 2 Oktober 2013

Sekretaris Jenderal  
Dewan Ketahanan Nasional



*Waris*

Waris  
Letnan Jenderal TNI



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**REVISI FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Unit Organisasi Eselon I : **Kedeputian Sistem Nasional**  
Tahun Anggaran : **2014**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)
Terselenggaranya kajian Dinamis secara komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang dilakukan melalui pengamatan, evaluasi, analisis dan perumusan sistem nasional serta penjabarannya ke dalam sub-sub sistemnya dalam rangka pembinaan ketahanan nasional, sebagai bahan masukan kebijakan nasional kepada Presiden RI selaku Ketua Wantannas.	Jumlah saran tindak strategis bidang sistem nasional	12 Naskah
	Jumlah saran tindak hasil perkiraan cepat bidang sistem nasional	10 Naskah
	Jumlah kajian hasil semiloka terkait permasalahan daerah yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian masalah nasional bidang sistem nasional	1 Naskah
	Jumlah laporan hasil pengkajian daerah terkait permasalahan daerah yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian masalah nasional	3 Laporan)*
	Persentase saran tindak kebijakan ketahanan nasional bidang sistem nasional yang dikirim ke Presiden	80 Persen

)\* Kebijakan Pemotongan Anggaran (APBNP)

Jakarta, 9 Oktober 2014

Deputi Sistem Nasional  
Setjen Wantannas



*[Signature]*  
Drs. Tahan SL Toruan, MM Dipl. SS  
Mayor Jenderal TNI



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**REVISI FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Unit Organisasi Eselon I : **Kedeputan Politik dan Strategi**  
Tahun Anggaran : **2014**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)
Terselenggaranya kajian Siklis maupun Dinamis secara komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang dilakukan melalui pengamatan, evaluasi, analisis dan perumusan politik strategi nasional serta rencana kontijensi	Jumlah saran tindak strategis bidang politik dan strategi	8 Naskah
	Jumlah dokumen siklis (Renkonnas)	1 Naskah
	Jumlah saran tindak hasil perkiraan cepat bidang politik dan strategi	10 Naskah
	Jumlah kajian hasil semiloka terkait permasalahan daerah yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian masalah nasional bidang politik dan strategi	1 Naskah
	Jumlah naskah hasil pengkajian daerah terkait permasalahan daerah yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian masalah nasional	4 Laporan)*
	Persentase saran tindak kebijakan ketahanan nasional bidang politik dan strategi yang dikirim ke Presiden	80 Persen

)\* Kebijakan Pemotongan Anggaran (APBNP)

Jakarta, 9 Oktober 2014

Deputi Politik dan Strategi  
Setjen Wantannas



Dis. Rusli Nasution, SH, MH, MM  
Inspektur Jenderal Polisi



SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

REVISI FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon I : **Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan**  
Tahun Anggaran : **2014**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terselenggaranya kajian Siklis maupun Dinamis secara komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang dilakukan melalui pengkajian dan penginderaan strategis nasional, regional, dan internasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional sebagai masukan dan saran tindak kepada Ketua Wantannas (Presiden RI)	Jumlah saran tindak strategis bidang pengkajian dan penginderaan	4 Naskah
	Jumlah dokumen siklis (Apstranas, Kirstranas, Telstranas)	3 Naskah
	Jumlah saran tindak hasil perkiraan cepat bidang pengkajian dan penginderaan	13 Naskah
	Jumlah kajian hasil semiloka terkait permasalahan daerah yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian masalah nasional bidang pengkajian dan penginderaan	1 Naskah
	Jumlah laporan hasil pengkajian daerah terkait permasalahan daerah yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian masalah nasional	3 Laporan )*
	Persentase saran tindak kebijakan ketahanan nasional bidang pengkajian dan penginderaan yang dikirim ke Presiden	80 Persen

)\* Kebijakan Pemotongan Anggaran (APBNP)

Jakarta, 9 Oktober 2014

Deputi Pengkajian dan Penginderaan  
Setjen Wantannas



Ir. Eko Djarmo Asmadi, MH  
Laksamana Muda TNI



SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

REVISI FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon I : **Kedeputan Pengembangan**  
Tahun Anggaran : **2014**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terselenggaranya kajian Dinamis secara komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang dilakukan melalui pengamatan, evaluasi, analisis dinamika segenap aspek kehidupan nasional dan pelaksanaan pembangunan nasional serta perumusan saran pemecahan krisis dan saran pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional yang terjadi	Jumlah saran tindak strategis bidang pengembangan	12 Naskah
	Jumlah saran tindak hasil perkiraan cepat bidang pengembangan	10 Naskah
	Jumlah kajian hasil semiloka terkait permasalahan daerah yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian masalah nasional bidang pengembangan	1 Naskah
	Jumlah laporan hasil pengkajian daerah terkait permasalahan daerah yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian masalah nasional	3 Laporan )*
	Persentase saran tindak kebijakan ketahanan nasional bidang pengembangan yang dikirim ke Presiden	80 Persen

)\* Kebijakan Pemotongan Anggaran (APBNP)

Jakarta, 9 Oktober 2014

Deputi Pengembangan  
Setjen Wantannas



Yadi Husyadi  
Marsekal Muda TNI



SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon II : **Biro Keuangan**  
Tahun Anggaran : **2014**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terselenggaranya perencanaan anggaran dan administrasi keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas melalui upaya pembinaan anggaran dan keuangan.	Persentase unit kerja yang mengajukan perencanaan kegiatan tahunan secara tepat waktu	100 Persen
	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 Persen
	Persentase unit kerja yang menyampaikan laporan pelaksanaan program dan anggaran secara tepat waktu	100 Persen
	Persentase tagihan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 Persen
	Jumlah laporan keuangan yang transparan dan akuntabel yang dapat diselesaikan tepat waktu	2 laporan
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP

Jakarta, 2 Oktober 2013

Kepala Biro Keuangan  
Setjen Wantannas



Edy Purwanto  
Brigadir Jenderal TNI



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Unit Organisasi Eselon II : **Biro Umum**  
Tahun Anggaran : **2014**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)
Terlaksananya penyelenggaraan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan administrasi umum	Persentase penilaian dan peningkatan kemampuan SDM	100 Persen
	Persentase pengawakan personel yang dibutuhkan organisasi sesuai Daftar Susunan Personel (DSP)	80 Persen
	Jumlah pegawai yang telah mengikuti assessment	5 orang
	Persentase pegawai yang lulus dari pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis dengan predikat baik	100 Persen
	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu	100 Persen
	Persentase ketersediaan tata naskah dan dokumen kepegawaian	100 Persen
	Persentase tingkat kehadiran pegawai	100 Persen
	Persentase data personil yang mutakhir dan valid	100 Persen
	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia sesuai dengan jumlah pegawai	90 Persen
	Persentase BMN dalam kondisi baik (layak pakai)	100 Persen
	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana yang ada	80 Persen

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
	Jumlah laporan BMN yang transparan dan akuntabel yang dapat diselesaikan tepat waktu	3 laporan
	Jumlah layanan pengelolaan belanja pegawai tepat waktu	12 bulan
	Persentase dokumen administrasi persuratan dan ekspedisi yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 Persen
	Jumlah layanan keprotokoleran dan kesekretariatan	12 bulan

Jakarta, 2 Oktober 2013

Kepala Biro Umum  
Setjen Wantannas



Y.A. Sulardi  
Brigadir Jenderal TNI



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**REVISI FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Unit Organisasi Eselon II : **Biro Persidangan dan Humas**  
Tahun Anggaran : **2014**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terselenggaranya pengelolaan persidangan dan kehumasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Setjen Wantannas	Persentase pengelolaan dan penatausahaan layanan persidangan yang efektif dan efisien	100 Persen
	Persentase bahan/materi hasil sidang yang diproduksi dan direproduksi	100 Persen
	Persentase pengelolaan dan penatausahaan layanan kehumasan yang efektif dan efisien	100 Persen
	Persentase publikasi/ pemberitaan tentang kegiatan Setjen Wantannas	100 Persen
	Jumlah naskah MoU dengan K/L terkait	- Naskah )*
	Persentase Rapat Koordinasi dan Forum Bakohumas yang terlaksana	80 Persen
	Persentase digitalisasi arsip dan perpustakaan yang lengkap dan mutakhir	80 Persen
	Persentase dokumen yang diupload di website Setjen Wantannas	100 Persen
	Jumlah pengunjung website Setjen Wantannas	110 org/hari
Terselenggaranya Pengelolaan Rapat Koordinasi Sidang Wantannas	Jumlah laporan pelaksanaan Rapat Koordinasi Sidang Wantannas	- Laporan)*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terselenggaranya pengelolaan jalur komunikasi data yang aman dan mutakhir dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Setjen Wantannas	Peringkat hasil evaluasi Kemen Kominfo terhadap pelaksanaan manajemen keamanan informasi Setjen Wantannas	5
	Persentase penggunaan aplikasi Sisfo Setjen Wantannas	50 Persen

)\* Kebijakan Pemotongan Anggaran (APBNP)

Jakarta, 9 Oktober 2014

Kepala Biro Persidangan dan Humas  
Setjen Wantannas



Susiswo Widodo, M.Si (Han)  
Brigadir Jenderal TNI



**LAMPIRAN II**

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN**

**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**TAHUN 2014**

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
TAHUN 2014**

**DEPUTI/BIRO : KEDEPUTIAN SISTEM NASIONAL**

Program	Kegiatan					Presentase Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	Terselenggaranya kajian Dinamis secara komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang dilakukan melalui pengamatan, evaluasi, analisis dan perumusan sistem nasional serta penjabarannya ke dalam sub-sub sistemnya dalam rangka pembinaan ketahanan nasional, sebagai bahan masukan kebijakan nasional kepada Presiden RI selaku Ketua Wantannas.	- Masukan Dana, SDM	Rupiah	3.475.104.000	3.451.761.250	99,33	
		- Keluaran					
		1) Saran tindak dinamis bid.sistem nasional	Naskah	12	12	100	
		2) Saran tindak perkiraan cepat bid.sistem nasional	Naskah	10	10	100	
		3) Kajian hasil semiloka	Naskah	1	1	100	
		4) Kajian hasil kajida	Naskah	3	3	100	
		- Hasil Respon Presiden:	Persen tase	80	85	106	
		1) Saran tindak dinamis bid.sistem nasional	Persen tase	80	90	112	
		2) Saran tindak perkiraan cepat bid.sistem nasional	Persen tase	80	70	87	
		3) Kajian hasil semiloka	Persen tase	80	100	125	
		4) Kajian hasil kajida	Persen tase	80	80	100	
		- Manfaat Untuk memberikan kerangka konseptual pembinaan ketahanan	Persen tase	80	85	106	

Program	Kegiatan					Presentase Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		nasional yang applicable  - Dampak Terselenggaranya pembinaan ketahanan nasional yang efektif dan efisien sehingga meningkatkan kualitas ketahanan nasional	Persentase	80	85	106	

Penjelasan :

1. Pada TA. 2014 Kedeputan Sistem Nasional telah menghasilkan 12 naskah kajian dinamis yang merupakan saran tindak strategis bidang Sistem Nasional, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Saran tindak dengan judul “Penguatan Parpol dan Ormas dalam rangka Pemantapan Demokrasi di Indonesia”.
    - Manfaat dari saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penguatan peran parpol dan ormas dalam menjaga dan memantapkan demokrasi serta menjaga sistem politik Indonesia yang kondusif.
    - Dampak yang diharapkan adalah Terwujudnya penguatan Parpol dan Ormas melalui restrukturisasi, refungsionalisasi, dan revitalisasi serta penguatan kelembagaan demokrasi yang berbasis jati diri bangsa dalam rangka pemantapan demokrasi di Indonesia.
  - b. Saran tindak dengan judul “Evaluasi Implementasi Sistem Presidential Pasca Amandemen UUD 1945 dalam rangka Pemantapan Ketatanegaraan Indonesia”.
    - Manfaat dari saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Memperkuat Sistem Presidential dalam rangka memantapkan sistem ketatanegaraan Indonesia.
    - Dampak yang diharapkan adalah Terwujudnya sistem presidential yang kuat melalui restorasi dan revitalisasi kewenangan sistem presidential yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, penguatan hubungan serta sinergitas antara Presiden dengan lembaga negara lainnya, memperjelas substansi dan mekanisme pertanggungjawaban Presiden dan lembaga negara lainnya serta

- penyederhanaan sistem partai politik dalam rangka pemantapan ketatanegaraan Indonesia.
- c. Saran tindak dengan judul “Penguatan Pengawasan Lembaga Pers dan Media untuk keberhasilan Pemilu 2014”.
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan peran lembaga pers dan media dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilu 2014 yang bebas, aman dan damai.
  - Dampak yang diharapkan adalah Terwujudnya pemberitaan dari lembaga pers dan media massa yang faktual, aktual, netral dan objektif melalui optimasi pengawasan secara proporsional, optimasi peran media massa dalam pemberitaan pemilu sebagai sarana edukasi strategis bagi masyarakat dan optimasi implementasi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dalam rangka keberhasilan Pemilu 2014.
- d. Saran tindak dengan judul “Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir, Pantai dan Pulau-pulau kecil dalam rangka ketahanan Nasional”.
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - Dampak yang diharapkan adalah Terwujudnya akselerasi pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil melalui optimalisasi pemberdayaan yang berbasis potensi daerah dan pemetaan kemiskinan, sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dan penguatan kelembagaan, optimalisasi peningkatan infrastruktur kemaritiman serta optimalisasi penguatan sistem perlindungan dan jaminan usaha masyarakat wilayah pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil dalam rangka mendukung ketahanan nasional.
- e. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan solusi permasalahan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka Ketahanan Nasional”.
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan Perdesaan guna memajukan taraf hidup masyarakat desa
  - Dampak yang diharapkan adalah Terwujudnya implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang efektif, *applicable* dan *operable* melalui peningkatan dan pengembangan kualitas SDM desa, penguatan kelembagaan perangkat desa, percepatan penetapan peraturan pelaksanaan UU, serta peningkatan ketersediaan infrastuktur desa guna terciptanya kehidupan desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis dalam rangka ketahanan nasional.
- f. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan solusi permasalahan infrastruktur jalan di daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional”.
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan mengatasi permasalahan infrastruktur jalan di daerah dalam rangka

- memperlancar distribusi perdagangan guna meningkatkan perekonomian nasional.
- Dampak yang diharapkan adalah Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi jalan yang mantap dan memadai melalui optimalisasi integrasi sistem jaringan transportasi jalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), peningkatan penguatan kebijakan dan anggaran serta optimalisasi harmonisasi dalam implementasi untuk meningkatkan penyelenggaraan infrastruktur jalan dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional
- g. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan solusi dampak perubahan iklim global terhadap kesehatan masyarakat dalam rangka perlindungan warga negara”
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan mengatasi dampak perubahan iklim guna menjaga dan melindungi kesehatan masyarakat.
  - Dampak yang diharapkan adalah Terjaminnya kesehatan masyarakat yang mantap dan mandiri dalam menghadapi dampak dari anomali perubahan iklim global melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap dampak perubahan iklim global terhadap kesehatan, peningkatan pemetaan kerentanan dan dampak perubahan iklim terhadap kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat terhadap korban dampak perubahan iklim global serta peningkatan dan pemerataan kemampuan penanggulangan resiko dampak perubahan iklim global terhadap kesehatan dalam rangka perlindungan warga negara.
- h. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan solusi terjadinya disharmoni hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD dalam rangka peningkatan pelayanan publik”.
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan menciptakan hubungan antara kepala daerah dan DPRD yang harmonis dalam rangka meningkat dan lancarnya pelayanan publik.
  - Dampak yang diharapkan adalah Terwujudnya hubungan yang harmonis antara DPRD dan Kepala Daerah melalui: peningkatan pemahaman regulasi makna pemerintahan daerah, sinkronisasi status sebagai pejabat negara dan bukan pejabat negara, sinkronisasi sistem kepartaian dengan sistem pemerintahan dan penciptaan posisi *checks and balances* secara proporsional dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
- i. Saran tindak dengan judul “Optimalisasi dan percepatan pemanfaatan potensi gas bumi nasional dalam rangka penguatan ketahanan energi nasional”.
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi gas bumi nasional dalam rangka menjaga/terpenuhinya kebutuhan energi nasional.
  - Dampak yang diharapkan adalah Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan potensi gas bumi nasional melalui: penguatan BUMN sektor migas, revisi peraturan perundang-undangan migas yang mendukung kepentingan nasional, peningkatan infrastruktur pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi nasional, pengembangan kebijakan fiskal bagi optimalisasi penggunaan gas bumi dan peningkatan

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi fungsi antar sektor pengelola gas bumi dalam rangka penguatan ketahanan energi nasional.

- j. Saran tindak dengan judul “Penataan Sistem Politik guna mewujudkan kehidupan politik yang kondusif dalam rangka penguatan ketahanan nasional”.
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan menata kehidupan politik yang kondusif dalam rangka menciptakan sistem politik Indonesia yang ideal.
  - Dampak yang diharapkan adalah Terwujudnya sistem politik yang komprehensif, *applicable* dan *operable* guna mewujudkan kehidupan politik yang kondusif melalui sinkronisasi paket undang-undang politik dengan konstitusi, harmonisasi sistem pemilu dengan sistem multipartai, peningkatan kinerja anggota dewan serta penguatan sistem pemerintahan presidensial dalam rangka penguatan ketahanan nasional.
- k. Saran tindak dengan judul “Mewujudkan pers dan media sosial yang bebas dan bertanggung jawab dalam rangka penguatan ketahanan nasional”.
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang menciptakan pers dan media sosial yang bebas dan bertanggung jawab dalam rangka menjaga stabilitas nasional.
  - Dampak yang diharapkan adalah Terwujudnya pers dan media sosial yang bebas dan bertanggung jawab melalui: peningkatan efektifitas penegakan hukum dan kode etik jurnalistik; pencegahan dan penertiban penyalahgunaan media sosial yang tidak bertanggungjawab secara berdaya guna; pencegahan tindakan intervensi pemilik modal yang memanfaatkan posisi pers sebagai pilar keempat demokrasi secara optimal; dan optimalisasi peran pers sebagai alat kontrol dan perekat sosial masyarakat; serta optimalisasi peran pers sebagai sarana edukasi strategis dan pembentuk karakter bangsa dalam rangka penguatan ketahanan nasional.
- l. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan solusi tingginya tingkat kematian ibu melahirkan dan bayi dalam rangka perlindungan warga negara dan percepatan pencapaian MDGs”.
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang komprehensif berkaitan dengan upaya untuk menurunkan tingginya kematian ibu melahirkan dan bayi dalam rangka perlindungan warga negara.
  - Dampak yang diharapkan adalah Terwujudnya penurunan tingkat kematian ibu dan bayi di Indonesia melalui peningkatan pemahaman masyarakat luas terhadap kesehatan reproduksi, optimalisasi perawatan dan pelayanan kesehatan standar terhadap ibu dan bayi pasca kelahiran, peningkatan pencapaian program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) berlandaskan program *best practices* dan harmonisasi berbagai kebijakan dan aturan terkait penurunan tingkat kematian ibu dan bayi serta pembangunan keluarga berkualitas yang ditujukan bagi perlindungan warga negara dan diarahkan pada percepatan pencapaian MDGs.

2. Pada TA. 2014 Kedeputan Sistem Nasional telah menghasilkan 10 naskah kajian perkiraan cepat yang merupakan saran tindak strategis bidang Sistem Nasional:
  - a. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan solusi implikasi putusan MK terkait pelaksanaan Pemilu Serentak”.
    - Manfaat dari saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan polemik putusan MK tentang Pelaksanaan Pemilu Serentak.
    - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya Kearifan berpolitik yang bersinergi dengan keharusan hukum yang dihasilkan oleh putusan MK dalam rangka memaknai tujuan penyelenggaraan pemilihan umum yaitu untuk lebih meningkatkan proses demokrasi yang dapat mensejahterakan masyarakat.
  - b. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan solusi Permasalahan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)”.
    - Manfaat dari saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
    - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya Program BPJS Kesehatan dengan tujuan menjamin peserta BPJS Kesehatan memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan secara optimal sesuai dengan amanat undang-undang.
  - c. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan solusi Dampak Permasalahan yang Menonjol serta Potensi Konflik di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan”.
    - Manfaat dari saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Dampak Permasalahan yang Krusial serta Potensi Konflik di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
    - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya Provinsi Sumatera Selatan yang secara geografis kaya akan sumber daya alam, dapat di eksplorasi dan eksploitasi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan tidak ada gejolak sosial.
  - d. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan solusi Permasalahan *Illegal Migrant* di Wilayah Pesisir Selatan Jawa Barat”
    - Manfaat dari saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Permasalahan *Illegal Migrant* yang ada di Indonesia.
    - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya kewibawaan pemerintah, hukum dan stabilitas nasional khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mencegah semakin deras masuknya imigran gelap yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dan kerugian berbagai aspek kehidupan nasional.
  - e. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Maraknya Kejahatan Kesusilaan yang Menimpa Terhadap Anak di Bawah Umur”
    - Manfaat dari saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan

dengan upaya untuk mengatasi Maraknya Kejahatan Kesusilaan yang Menimpa Anak di Bawah Umur

- Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya pencegahan terjadinya kejahatan terhadap kesusilaan khususnya pada Anak di Bawah Umur melalui sinergita, peningkatan koordinasi antar lintas kelembagaan terkait dan meningkatkan/menggalakkan bimbingan serta sosialisasi secara luas kepada masyarakat tentang pentingnya peran pendidik, keluarga dan lingkungan untuk mencegah timbulnya tindak pelecehan seksual di lingkungannya.
- f. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Permasalahan Dukungan Transportasi Saat Mudik Lebaran dalam rangka Pelayanan dan Perlindungan Warga Negara”.
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan upaya mengatasi Permasalahan Dukungan Transportasi Saat Mudik Lebaran dalam rangka Pelayanan dan Perlindungan Warga Negara.
  - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya dukungan transportasi darat, laut dan udara yang baik, guna meningkatkan daya tampung akibat kepadatan dan penumpukan penumpang baik sarana prasarana maupun alat angkut transportasi secara optimal khususnya pada saat Hari Raya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
- g. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Potensi Konflik Horizontal Pasca Pilpres 2014”.
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan upaya mengatasi permasalahan bila terjadi Konflik Horizontal Pasca Pilpres 2014.
  - Dampak yang diharapkan adalah teratasinya berbagai konflik yang terjadi pasca pilpres 2014 guna menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka penguatan ketahanan nasional.
- h. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Potensi Permasalahan Implementasi Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat (Kartu Sakti Indonesia) dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik”.
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Permasalahan Implementasi Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat (Kartu Sakti Indonesia) dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik
  - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya penanggulangan kemiskinan melalui skema Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar dengan tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka perlindungan warga negara.
- i. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Permasalahan Imigran Gelap di Daerah dalam rangka Menangkal Ideologi Asing”.
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan upaya untuk

- mencegah berkembangnya ideologi asing seiring dengan meningkatnya imigran gelap yang masuk ke Wilayah Indonesia.
- Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya kehidupan nasional yang baik tanpa ada gangguan dari paham/ideologi asing yang di bawa oleh Imigran gelap dalam rangka penguatan Ketahanan Nasional.
- j. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Maraknya Pencurian Ikan di Wilayah Laut Indonesia dalam rangka Penanggulangan Kebocoran Pendapatan Negara”.
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Permasalahan Maraknya Pencurian Ikan di Wilayah Laut Indonesia dalam rangka Penanggulangan Kebocoran Pendapatan Negara.
  - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya perlindungan sumber daya alam laut Indonesia dari maraknya pencurian ikan untuk mencegah kebocoran pendapatan negara dalam rangka mensejahterakan rakyat Indonesia.
3. Pada TA. 2014 Kedepuyan Sistem Nasional telah menghasilkan 1 naskah kajian hasil semiloka dengan judul “Strategi dan Implementasi Percepatan Pengembangan Kawasan Perbatasan Berbasis Potensi Daerah dan Pemetaan Kemiskinan dalam rangka Penguatan Ketahanan Nasional”.
- Manfaat dari kajian tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Pengembangan Kawasan Perbatasan Berbasis Potensi Daerah dan Pemetaan Kemiskinan dalam rangka Penguatan Ketahanan Nasional.
  - Dampak yang diharapkan adalah Terwujudnya pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan melalui strategi dan implementasi percepatan penanganan kawasan perbatasan berbasis potensi daerah guna menambah rasa nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan dan penguatan ketahanan nasional.
4. Pada TA. 2014 Kedepuyan Sistem Nasional telah menghasilkan 3 Laporan hasil pengkajian daerah, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
- 1) Manfaat dari Kajian tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan nasional khususnya di Kabupaten Tasikmalaya dan Sukabumi terutama menjelang pelaksanaan Pemilu 2014, dan mencari solusi permasalahan: pertambangan pasir besi, kasus sengketa lahan serta penanganan imigran gelap.
  - 2) Dampak yang diharapkan adalah tertatanya pemanfaatan SDA di wilayah di Kabupaten Tasikmalaya dan Sukabumi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

- 1) Manfaat dari Kajida tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ketahanan nasional di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan yang secara geografis kaya akan sumber daya alam namun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan.
  - 2) Dampak yang diharapkan adalah penataan pengelolaan sumur-sumur minyak dan potensi SDA lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- 1) Manfaat dari Kajida tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan, peluang, dan potensi pengembangan kawasan perbatasan dan terpecahkannya solusi-solusi terhadap permasalahan yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
  - 2) Dampak yang diharapkan adalah pengembangan kawasan perbatasan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan dalam rangka menciptakan ketahanan nasional.

Jakarta, 29 Januari 2015

Deputi Sistem Nasional



*[Handwritten signature]*  
Drs. Tahan S.L. Toruan, MM, Dipl.SS  
Mayor Jenderal TNI

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
TAHUN 2014**

**DEPUTI/BIRO : KEDEPUTIAN POLITIK DAN STRATEGI**

Program	Kegiatan					Presentase Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	Terselenggaranya kajian Siklis maupun Dinamis secara komprehensif aspek kehidupan nasional (ipoleksosbudhankam) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang dilakukan melalui pengamatan, evaluasi, analisis dan perumusan politik strategi nasional serta rencana kontijensi	- Masukan Dana, SDM	Rupiah	3.083.040.000	3.068.702.350	99,53	
		- Keluaran					
		1) Saran tindak dinamis bid.politik&strategi	Naskah	8	8	100	
		2) Saran tindak siklis bid.politik&strategi	Naskah	1	1	100	
		3) Saran tindak perkiraan cepat bid. politik&strategi	Naskah	10	10	100	
		4) Kajian hasil semiloka	Naskah	1	1	100	
		5) Kajian hasil kajida	Naskah	4	4	100	
		- Hasil Respon Presiden:	Persentase	80	80	100	
		1) Saran tindak dinamis bid. politik&strategi	Persentase	80	90	112	
		2) Saran tindak siklis bid.politik&strategi	Persentase	80	100	125	
		3) Saran tindak perkiraan cepat bid. politik&strategi	Persentase	80	70	87	
		4) Kajian hasil semiloka	Persentase	80	100	125	
		5) Kajian hasil kajida	Persentase	80	50	62	
- Manfaat Untuk memberikan kerangka konseptual pembinaan ketahanan nasional yang	Persentase	80	80	100			

Program	Kegiatan					Presentase Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>applicable</i> - Dampak Terselenggaranya pembinaan ketahanan nasional yang efektif dan efisien sehingga meningkatnya kualitas ketahanan nasional	Persentase	80	80	100	

Penjelasan :

1. Pada TA. 2014 Kedeputan Polstra telah menghasilkan 24 Kajian berupa kajian Siklis, Dinamis maupun perkiraan cepat, dengan perincian sebagai berikut:

a. Kajian Siklis berupa Renkonnas

Saran tindak dengan Judul **“Rencana Tindakan Menghadapi Kontinjensi Nasional Menghadapi Krisis Pangan Tahun 2015”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan krisis pangan Tahun 2015 apabila terjadi Kontinjensi Nasional Krisis Pangan.

Dampak yang diharapkan

Pemerintah-K/L terkait dapat segera menyusun rencana aksi secara terpadu untuk melakukan pencegahan dini – penindakan terukur dan pembinaan paska krisis agar aktivitas masyarakat kembali normal. Sehingga krisis pangan dapat dikelola dengan baik, dan aparat keamanan serta K/L terkait sudah melakukan berbagai palatihan dan kesiapan.

b. Kajian Dinamis

1) Saran tindak dengan judul **“Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Lembaga Perwakilan dalam rangka Konsolidasi Demokrasi”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan dan bahan koordinasi dengan DPR RI untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kapasitas dan akuntabilitas lembaga perwakilan dalam rangka konsolidasi demokrasi.

**Dampak yang diharapkan**

KemenPan & RB, Kemenkopolkukam, Kemendagri, Kemenkominfo dan Sekretariat Jenderal DPR RI serta Parpol, dapat memberdayakan peran dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai lembaga birokrasi yang modern

sebagai mitra DPR RI, meningkatkan dan memperluas fungsi *parliament watch* dari *civil society*, komunikasi dan relasi anggota DPR RI dengan konstituen, Menerapkan dan mempercepat program *e-government*, Meningkatkan

2) Saran tindak dengan judul **“Membangun Iklim Politik Kondusif dalam rangka Mencapai Demokrasi Keberadaban”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan membangun iklim politik yang kondusif dalam rangka ketahanan nasional.

**Dampak yang diharapkan**

Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenag, Kemensos, Kemenakertrans, Polri, Kopolnas dan Komisi Kejaksaan meningkatkan iklim politik yang kondusif dari masyarakat, partai politik dan penyelenggara negara guna mencapai demokrasi berkeadaban.

3) Saran tindak dengan judul **“Meningkatkan Pengelolaan BBM Nasional yang Efisien dan Efektif dalam rangka Mengatasi Kelangkaan BBM Bersubsidi”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan Kelangkaan BBM Bersubsidi dalam rangka ketahanan energi.

**Dampak yang diharapkan**

KemenESDM, KemenBUMN, Kemenkeu, Kemenhub dan Bappenas dapat berkoordinasi untuk dapat meningkatkan cadangan migas, serta keputusan yang tegas untuk mengurangi subsidi BBM, pengawasan distribusi sehingga dapat mengatasi kelangkaan BBM subsidi.

4) Saran tindak dengan judul **“Memperkuat Kemandirian Ekonomi Di Tengah Arus Liberalisasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah pemerintah yang berkaitan dengan kemandirian ekonomi dalam rangka ketahanan nasional.

**Dampak yang diharapkan**

Kemenkeu, KemenESDM, Kemendag, Kemenperin, Kementan, Kemenpariwisata, KemenKP, KemenBUMN, KemenPPN/Bappenas, BI dan BKPM berkoordinasi dalam merealisasikan kebijakan pemerintah secara konsisten untuk memperkuat kemandirian ekonomi.

5) Saran tindak dengan judul **“Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (Non Hayati) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah pemerintah yang berkaitan

dengan pengelolaan sumber daya kelautan (non hayati) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

#### **Dampak yang diharapkan**

**Kemenko Perekonomian, Kemendagri, Kemenperin, Kemenhub, KemenBUMN, Kemenkeu, Kemendag, KemenPU, KemenPPN/ Bappenas, BKPM, BPPT dan Pemda** Memperkuat pelaksanaan program pemberdayaan di sektor kelautan non hayati. Sehingga terbuka peluang kerja bagi masyarakat nelayan untuk memperbaiki taraf hidup mereka yang akan dapat mengurangi angka penduduk miskin.

- 6) Saran tindak dengan judul “**Optimalisasi Produktivitas Kemaritiman Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara (Sumber Daya Kelautan Hayati)**”

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas dan pemanfaatan sumber daya maritim dalam rangka ketahanan nasional.

#### **Dampak yang diharapkan**

KemenKP, KemenKop dan UMKM, Kemendagri, Kemendag, Kemenperid, Kemenhub, berkerjasama dengan Dunia Usaha diharapkan kedepan kebijakan pembangunan (2015-2019) harus lebih berorientasi pada pembangunan kemaritiman.

- 7) Saran tindak dengan judul “**Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Listrik Nasional Menghadapi ASEAN Economic Community 2015**”

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan upaya dan pengelolaan sumberdaya listrik nasional dalam rangka ketahanan nasional.

#### **Dampak yang diharapkan**

**Kemenko Bidang Perekonomian; Kemen ESDM; Kemen BUMN; PLN; PGN; Dewan Energi Nasional** bersinergi untuk Mengedepankan kebijakan yang memprioritaskan sumber energi primer murah (gas dan batubara) untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pengelolaan tenaga listrik.

- 8) Saran tindak dengan judul “**Pengembangan Industri Perkapalan untuk Meningkatkan Kemampuan Maritim Nasional dalam rangka ASEAN Economic Community 2015**”

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah pemerintah yang berkaitan dengan meningkatkan kemampuan maritim untuk menghadapi AEC 2015 dalam rangka ketahanan nasional.

#### **Dampak yang diharapkan**

**Kemendag, Kemenperin, Kemenhub, Kemenkeu, Kemen BUMN, Bappenas dan Bank Indonesia berkoordinasi** untuk dapat menetapkan *road map* pembangunan industri kapal moderen yang melibatkan peran serta sektor swasta, dukungan dana dan investasi, industri komponen dan industri penunjang, pemberian insentif, modernisasi infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM Perkapalan yang didukung oleh regulasi yang sinkron dan harmonis dalam rangka AEC 2015.

### c. Perkiraan Cepat

- 1) Saran tindak dengan judul “**Antisipasi dan Solusi terhadap Aksi Terorisme pada Pelaksanaan Pemilu 2014 dalam rangka Ketahanan Nasional**”

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah pemerintah yang berkaitan dengan upaya menghadapi ancaman aksi terorisme pada pelaksanaan Pemilu 2014.

#### **Dampak yang diharapkan**

Mencegah terjadinya gangguan terorisme secara dini melalui diteksi dini untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemungkinan ancaman aksi terorisme agar pelaksanaan Pemilu 2014 berjalan lancar.

- 2) Saran tindak dengan judul “**Membudayakan Penggunaan Kendaraan Umum suatu Terobosan Mengurai Kemacetan Lalu lintas di Kota-Kota Besar**”

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah pemerintah yang berkaitan dengan upaya mengatasi kemacetan lalu lintas di ibukota besar.

#### **Dampak yang diharapkan**

Masyarakat dapat membudayakan menggunakan kendaraan umum sehingga kemacetan di iukota besar dapat terurai.

- 3) Saran tindak dengan judul “**Antisipasi Menghadapi Perkembangan Keadaan Pasca Ditetapkannya Capres Terpilih 2014 dalam Perspektif Keamanan Nasional**”

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah pemerintah dalam menghadapi perkembangan situasi pasca ditetapkannya Capres terpilih 2014 dalam rangka keamanan nasional.

#### **Dampak yang diharapkan**

*Suasana* pasca ditetapkannya Capres terpilih 2014 tetap dalam keadaan kondusif.

- 4) Saran tindak dengan judul “**Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan Berkelanjutan dalam rangka Mengurangi Angka Kemiskinan**”

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi pedesaan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan.

#### **Dampak yang diharapkan**

Dengan pemberdayaan ekonomi pedesaan yang berkelanjutan dapat mengurangi angka kemiskinan.

- 5) **Saran tindak dengan judul “Mencegah Tergilasnya Warung Tradisional Akibat Ekspansi Retail Modern dalam Upaya Menekan Disparitas Kehidupan Masyarakat”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah pemerintah dalam mencegah tergilasnya warung tradisional akibat ekspansi retail modern dalam rangka ketahanan nasional.

#### **Dampak yang diharapkan**

Merevitalisasi dengan cepat pasar tradisional, dan peningkatan daya saing sektor informal seperti warung tradisional dan pasar tradisional.

- 6) **Saran tindak dengan judul “Mengendalikan Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Guna Menjaga Ketahanan Pangan”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah pemerintah dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dalam rangka ketahanan pangan.

#### **Dampak yang diharapkan**

Mencegah terjadinya alih fungsi lahan yang dapat mengurangi lahan pertanian agar ketahanan pangan tidak terganggu.

- 7) **Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi terhadap Risiko Kemungkinan Dua Putaran Pilpres 2014”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah pemerintah yang berkaitan dengan risiko kemungkinan dua putaran Pilpres 2014 dalam rangka ketahanan nasional.

#### **Dampak yang diharapkan**

Lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar aparat keamanan dan antar K/L baik tingkat pusat maupun daerah dengan KPU dan KPUD beserta jajarannya sesuai dengan protap yang telah ditetapkan untuk menjaga pelaksanaan Pilpres yang aman, tertib, dan lancar.

- 8) **Saran tindak dengan judul “Pemangkasan Bertahap Terhadap Peningkatan Subsidi BBM dan Penguatan APBN 2014/RAPBN 2015 dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah pemerintah yang berkaitan pengelolaan subsidi BBM dalam rangka penguatan APBN 2014/RAPBN 2015 dalam menjaga stabilitas ekonomi.

**Dampak yang diharapkan**

Meningkatkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi, dan memberantas praktik kartel, yang menguasai dan mendominasi pengelolaan dan pemanfaatan migas dari hulu – hilir.

- 9) **Saran tindak dengan judul “Peningkatan Pengamanan terhadap Perhitungan Hasil Pemungutan Suara Pilpres 2014 Pasca Kontroversi Quick Count”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah pemerintah yang berkaitan dengan dampak perhitungan hasil pemungutan suara Pilpres 2014 pasca kontroversi *quick count* dalam rangka ketahanan nasional.

**Dampak yang diharapkan**

Mengantisipasi berbagai gerakan penolakan anarkis menjelang dan sesudah pengumuman hasil rekapitulasi suara secara nasional oleh KPU.

- 10) **Saran tindak dengan judul “Penguatan Daya Saing Industri Produk Alat Peraga Pendidikan dalam rangka Peningkatan Kualitas SDM dan Menghadapi ASEAN Economy Community 2015”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM di bidang daya saing industri produk alat peraga pendidikan dalam menghadapi *ASEAN Economy Community 2015*.

**Dampak yang diharapkan**

Mempercepat upaya penguatan daya saing industri alat peraga pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam menghadapi *ASEAN Economy Community 2015*.

2. Pada TA. 2014 Kedeputian Politik dan Strategi telah menghasilkan 1 Naskah kajian hasil semiloka dengan perincian sebagai berikut:

Naskah kajian hasil semiloka dengan judul **“Optimalisasi Perkebunan Sawit dan Budidaya Perikanan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di Provinsi Riau”**

- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah pemerintah yang berkaitan dengan

mengoptimalkan perkebunan sawit dan budidaya perikanan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka ketahanan nasional.

- **Dampak yang diharapkan**

Meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Riau dengan mengoptimalkan perkebunan sawit dan budidaya perikanan.

3. Pada TA. 2014 Kedepujian Politik dan Strategi telah menghasilkan 4 Naskah kajian hasil kajian daerah dengan perincian sebagai berikut:

a. Naskah kajian hasil kajian daerah dengan judul **“Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah dan Probematika dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat pada Pemkot Pekanbaru dan Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah pemerintah yang berkaitan dengan Pemberdayaan dan pengelolaan potensi ekonomi daerah dalam rangka ketahanan nasional.

**Dampak yang diharapkan**

Meningkatkan peran serta dan andil masyarakat lapisan bawah dalam perekonomian daerah baik melalui usaha informal, koperasi maupun kerjasama dengan dunia usaha di Prov. Riau.

b. Naskah kajian hasil kajian daerah dengan judul **“Determinasi Pembangunan dan Pengelolaan Potensi Ekonomi di Provinsi Gorontalo”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan potensi ekonomi di Provinsi Gorontalo dalam rangka ketahanan nasional.

**Dampak yang diharapkan**

PMA dan PMDN, bahkan investor lokal dapat mengembangkan bisnis berbasis produk pertanian dan perkebunan terutama komoditas beras, jagung, kedelai, singkong, dan rumput laut.

c. Naskah kajian hasil kajian daerah dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Lahan di Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah pemerintah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa lahan di Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim dalam rangka ketahanan nasional.

**Dampak yang diharapkan**

Meningkatkan tindakan deteksi dini dan cegah dini terhadap permasalahan di wilayah Kabupaten Kukar khususnya daerah yang berpotensi konflik yang melibatkan beberapa masyarakat berbeda etnis serta secara optimal berupaya menjaga situasi kamtibmas dalam keadaan kondusif.

- d. Naskah kajian hasil kajian daerah dengan judul “**Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada Sektor Pariwisata dan Agro Industri di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat**”

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada sektor pariwisata dan agro industri dalam rangka ketahanan nasional.

#### **Dampak yang diharapkan**

Mempercepat pemberian fasilitas yang kompetitif untuk mendorong minat investor berinvestasi, seperti *investment allowance*, pajak deviden, kompensasi kerugian lebih lama, *tax holiday* dan bisa dimungkinkan bagi perusahaan yang sudah punya *tax holiday* sebelum KEK, sehingga pemberian fasilitas itu diharapkan dapat mendorong minat investor untuk berinvestasi.



Jakarta, 3 Februari 2015

Deputi Politik dan Strategi

Drs. Rusli Nasution, SH, MH, MM  
Inspektur Jenderal Polisi

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
TAHUN 2014**

**DEPUTI/BIRO : KEDEPUTIAN PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN**

Program	Kegiatan					Presentase Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket
	Uraian	Indikator Kerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	Terselenggaranya kajian Siklis maupun Dinamis secara komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang dilakukan melalui pengkajian dan penginderaan strategis nasional, regional, dan internasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional sebagai masukan dan saran tindak kepada Ketua Wantannas (Presiden RI)	- Masukan Dana, SDM	Rupiah	3.134.418.000	3.127.876.050	99,79	
		- Keluaran					
		1)Saran tindak dinamis bid.Jiandra	Naskah	4	4	100	
		2)Saran tindak siklis bid. Jiandra	Naskah	3	3	100	
		3)Saran tindak perkiraan cepat bid. Jiandra	Naskah	13	13	100	
		4)Kajian hasil semiloka	Naskah	1	1	100	
		5)Kajian hasil kajida	Naskah	3	3	100	
		- Hasil Respon Presiden:					
		1)Saran tindak dinamis bid. Jiandra	Persentase	80	85	106	
		2)Saran tindak siklis bid. Jiandra	Persentase	80	100	112	
		3)Saran tindak perkiraan cepat bid. Jiandra	Persentase	80	85	133	
		4)Kajian hasil semiloka	Persentase	80	100	125	
		5)Kajian hasil kajida	Persentase	80	67	83	
- Manfaat Terintegrasinya program pembangunan sektoral dalam pembangunan nasional	Persentase	80	87	108			
<b>Dampak :</b> Terwujudnya pembangunan nasional secara terpadu dan berkesinambungan	Persentase	80	87	108			

Penjelasan:

1. Pada TA 2014 Kedeputan Pengkajian dan Penginderaan telah menghasilkan 7 (tujuh) naskah kajian (tiga kajian siklis dan empat kajian dinamis) yang merupakan saran tindak strategis bidang pengkajian dan penginderaan, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Naskah kajian siklis berupa Perkiraan Strategis Nasional (Kistranas) 2015
    - Manfaat dari naskah Kistranas dapatnya digunakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/LPNK) sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan tahun 2015 sesuai kewenangan masing-masing dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang semakin tangguh.
    - Dampak yang diharapkan adalah isu strategis nasional yang diperkirakan berpengaruh terhadap pencapaian pembangunan nasional pada tahun 2015 dapat diantisipasi dengan baik oleh K/LPNK yang berkewenangan.
  - b. Naskah kajian siklis berupa Apresiasi Strategis Nasional (Apstranas) 2015
    - Manfaat dari naskah Apstranas dapatnya digunakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/LPNK) sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah strategis pada tahun 2015 sesuai kewenangan masing-masing untuk mewujudkan ketahanan nasional yang semakin tangguh.
    - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya pembangunan nasional yang antisipatif terhadap perkembangan lingkungan strategis nasional.
  - c. Naskah kajian siklis berupa Telaahan Strategis Nasional (Telstranas) 2015 - 2019
    - Manfaat dari naskah Telstranas dapatnya digunakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/LPNK) sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan lima tahun ke depan sesuai kewenangan masing-masing untuk mewujudkan ketahanan nasional yang semakin tangguh.
    - Dampak yang diharapkan adalah rencana strategis K/LPNK dapat sinkron dengan perkembangan lingkungan strategis dan sesuai dengan perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJM) yang disusun Presiden terpilih.
  - d. Saran tindak dengan judul *Revitalisasi Peran Penelitian dan Pengembangan Rekayasa Keantariksaan (Litbangyasa) dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara*
    - Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil litbangyasa dalam mendukung ketahanan nasional, utamanya aspek pertahanan keamanan negara.
    - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya peningkatan peran litbangyasa dalam mendukung pertahanan dan keamanan negara.
  - e. Saran tindak dengan judul *Efisiensi dan Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Guna Peningkatan Produksi Pertanian Dalam Rangka Ketahanan Pangan*
    - Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.
    - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya distribusi pupuk bersubsidi hingga ke petani dengan lancar sehingga produksi pertanian dapat meningkat.
  - f. Saran tindak dengan judul *Pemanfaatan Nuklir sebagai Solusi guna Mengatasi Ancaman Kelangkaan Sumber Energi dalam Mendukung Pembangunan Nasional.*

- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan nuklir untuk mendukung ketahanan energi, khususnya energi listrik yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan nasional.
  - Dampak yang diharapkan adalah tersedianya energi listrik yang dibutuhkan dalam meningkatkan pembangunan nasional.
- g. Saran tindak dengan judul *Antisipasi dan Solusi Penyediaan Tanah Pertanian Guna Mendukung Penyelenggaraan Reforma Agraria Dalam Rangka Ketahanan Pangan*.
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan upaya penyiapan 9 juta hektar lahan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan.
  - Dampak yang diharapkan adalah tersedianya lahan pertanian yang dibutuhkan oleh petani yang belum memiliki lahan usaha dalam mewujudkan ketahanan pangan.
2. Pada TA 2014 Kedeputusan Pengkajian dan Penginderaan telah menghasilkan 13 (tigabelas) naskah kajian perkiraan cepat (Kirpat) yang merupakan saran tindak strategis bidang pengkajian dan penginderaan, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Saran tindak dengan judul *Peningkatan Partisipasi Rakyat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014*.
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pemantapan kehidupan berdemokrasi di Indonesia dan meningkatkan ketahanan nasional, terutama pada aspek politik dan sosial budaya.
  - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya pemahaman masyarakat akan mekanisme berpolitik dan berdemokrasi yang semakin meningkat.
- b. Saran tindak dengan judul *Antisipasi Pengaruh Konflik Suriah Terhadap Indonesia*.
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan antisipasi dampak negatif konflik Suriah (termasuk konflik Sunni-Syiah) agar tidak mengganggu ketahanan nasional bangsa Indonesia.
  - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya benteng yang kuat untuk membendung konflik Suriah (termasuk konflik sunni-syiah) agar tidak merambah kedalam kehidupan masyarakat Indonesia.
- c. Saran tindak dengan judul *Antisipasi dan Solusi Pengaruh Krisis Ukraina terhadap Indonesia*
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan antisipasi isu pemisahan Papua dari NKRI yang didorong oleh kekuatan eksternal.
  - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya NKRI yang semakin kokoh.
- d. Saran tindak dengan judul *Antisipasi dan Solusi Realisasi Pembangunan Kekuatan Alutsista TNI sesuai Minimum Essential Force (MEF)*
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang

- berkaitan dengan penguatan kekuatan pertahanan sesuai dengan ancaman yang dihadapi Indonesia.
- Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya kemampuan untuk memenuhi *Minimum Essential Force (MEF)*.
- e. Saran tindak dengan judul *Pemilu India dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia*
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan berdemokrasi dengan mengambil pengalaman praktek berdemokrasi di India.
  - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya kehidupan berdemokrasi yang lebih baik, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu.
- f. Saran tindak dengan judul *Mencegah dan Menanggulangi Pengaruh Kasus Boko Haram*
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan antisipasi pengaruh Boko Haram terhadap kelompok garis keras yang berkembang di Indonesia.
  - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya filter yang mampu untuk menyaring pengaruh ideologis yang bersifat merusak nasionalisme bangsa Indonesia.
- g. Saran tindak dengan judul *Mencegah dan Menanggulangi Pengaruh ISIS di Indonesia*
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan antisipasi pengaruh ISIS terhadap kelompok garis keras yang berkembang di Indonesia.
  - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya filter yang mampu untuk menyaring pengaruh ideologis yang bersifat merusak nasionalisme bangsa Indonesia.
- h. Saran tindak dengan judul *Antisipasi dan Solusi Pengaturan Keamanan Rute Penerbangan Internasional*
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan keamanan rute penerbangan internasional.
  - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya keamanan rute penerbangan internasional sesuai dengan standar yang berlaku.
- i. Saran tindak dengan judul *Antisipasi dan Solusi Menghadapi Penyadapan Melalui Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi Kabel Serat Optik*
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan keamanan jaringan komunikasi terutama komunikasi pejabat tinggi negara, khususnya dari ancaman penyadapan oleh pihak yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional.
  - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya sistem *firewall* yang dapat melindungi jaringan komunikasi pejabat tinggi negara.
- j. Saran tindak dengan judul *Antisipasi dan Solusi Penanggulangan Illegal Fishing di ZEEI*.

- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan *illegal fishing* di ZEEI dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional.
  - Dampak yang diharapkan adalah berkurangnya *illegal fishing* yang dapat merugikan perekonomian Indonesia.
- k. Saran tindak dengan judul *Implementasi Program Tol Laut Dalam Pembangunan Kesatuan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan konektivitas antarwilayah melalui laut untuk mewujudkan kesatuan ekonomi dan ketahanan nasional.
  - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya kesatuan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
- l. Saran tindak dengan judul *Peningkatan Kemampuan Produksi dan Pembangunan Kilang Baru BBM Dalam Negeri*.
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan BBM dalam negeri dan mewujudkan ketahanan energi dari sisi penyediaan BBM untuk konsumsi dalam negeri.
  - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya peningkatan kemampuan penyediaan BBM di dalam negeri menuju kemandirian produksi BBM.
- m. Saran tindak dengan judul *Implementasi Program Redistribusi Tanah dalam rangka Reforma Agraria mendukung Ketahanan Pangan*.
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan 9 juta ha lahan pertanian melalui redistribusi tanah terlantar dalam mendorong ketahanan pangan.
  - Dampak yang diharapkan adalah tersedianya lahan pertanian yang dapat diusahakan petani secara lebih menguntungkan dengan produktivitas yang lebih tinggi.
3. Pada TA 2014 Kedeputusan Pengkajian dan Penginderaan telah menghasilkan 1 (satu) naskah kajian dengan judul *Pendidikan Karakter Terintegrasi dan Berkelanjutan di Tingkat Sekolah Hingga Perguruan Tinggi Dengan Sistem Spiral Dalam Rangka Nasionalisme* melalui kerjasama antara Setjen Wantannas dengan Universitas Negeri Semarang dan telah disemilokakan pada 22-23 Oktober 2014.
- Manfaat dari kajian semiloka tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan karakter dalam upaya meningkatkan nasionalisme bangsa Indonesia sejak dini.
  - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya nasionalisme bangsa Indonesia yang semakin menguat.
4. Pada TA 2014 Kedeputusan Pengkajian dan Penginderaan telah menghasilkan 3 (tiga) laporan hasil pengkajian daerah, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran *Antisipasi dan Solusi Penyelesaian Permasalahan Menonjol pada Sektor Pariwisata dan Pertambangan* di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan pada tanggal 24 - 28 Maret 2014.
  - Manfaat dari Kajida tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata dan penataan pertambangan di Provinsi NTT.
  - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya dukungan kepada Provinsi NTT dalam mengembangkan potensi pariwisata dan penanganan kasus-kasus pertambangan.
- b. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran *Antisipasi dan Solusi Penyelesaian Permasalahan Menonjol terkait mitigasi bencana, pertambangan, dan infrastruktur* di Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 01 - 04 April 2014.
  - Manfaat dari Kajida tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan mitigasi bencana, Pertambangan Tanpa Izin (PETI), dan peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata untuk mendukung pembangunan Provinsi Sumatera Barat.
  - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya dukungan kepada Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan potensi pariwisata (infrastruktur), penanganan kasus-kasus pertambangan (PETI), dan mitigasi bencana.
- c. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran *Antisipasi dan Solusi Penyelesaian Permasalahan Menonjol terkait sengketa lahan, kasus PETI dan perambahan lahan/hutan* di Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 14 - 18 Juli 2014
  - Manfaat dari Kajida tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua DKN sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan sengketa lahan, kasus PETI dan perambahan lahan/hutan dalam rangka mendorong ketahanan nasional di Provinsi Jambi
  - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya dukungan kepada Provinsi Jambi dalam penyelesaian dan penanganan masalah sengketa lahan, kasus-kasus pertambangan (PETI), dan perambahan lahan/hutan.



Jakarta, 29 Januari 2015

Deputi Pengkajian dan Penginderaan

Ir. Eko Djalmo Asmadi, MH  
Laksamana Muda TNI



Program	Kegiatan					Presentase Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket
	Uraian	Indikator Kerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Dampak Terselenggaranya pembinaan ketahanan nasional yang efektif dan efisien sehingga meningkatkan kualitas ketahanan nasional	Persentase	80	88	110	

Penjelasan :

1. Pada Tahun Anggaran 2014 Kedeputian Pengembangan telah menghasilkan 12 (dua belas) naskah kajian dinamis yang merupakan saran tindak strategis bidang Pengembangan, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Saran tindak dengan judul “Penegakan Integritas, Independensi dan Profesionalisme Mahkamah Konstitusi”.
    - 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan profesionalisme Mahkamah Konstitusi dalam rangka ketahanan nasional.
    - 2) Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya MK yang berintegritas, independen, profesional, dan berwibawa melalui penguatan institusi, pemulihan kepercayaan masyarakat, penjagaan martabat, perilaku dan kehormatan Hakim Konstitusi dalam rangka supremasi hukum.
  - b. Saran tindak dengan judul “Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Daerah Tertinggal dalam rangka Menjaga Ketahanan Nasional”.
    - 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tertinggal dalam rangka ketahanan nasional.
    - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya kesejahteraan rakyat di daerah tertinggal melalui: sinergitas antar K/L, antara pusat dan daerah dan antar Pemda, serta peningkatan peran serta masyarakat dan pelaku usaha lainnya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan infrastruktur, pembangunan iklim investasi yang kondusif serta peningkatan wawasan kebangsaan dalam rangka menjaga ketahanan nasional.

- c. Saran tindak dengan judul “Penguatan Kapabilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Rangka *Asean Economic Community* (AEC) Tahun 2015”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penguatan kapabilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka ketahanan nasional.
  - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya penguatan kapabilitas UMKM yang berdaya tahan dan berdaya saing melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kemampuan SDM, pengembangan kelembagaan dan peningkatan daya tahan, daya saing produk dan jasa, dalam rangka menghadapi *ASEAN Economic Community* (AEC) tahun 2015.
- d. Saran tindak dengan judul “Reorientasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SISRENBANGNAS) dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SISRENBANGNAS) dalam rangka ketahanan nasional.
  - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya sistem pemerintahan presidential melalui reorientasi sistem perencanaan pembangunan nasional, pemisahan kekuasaan secara proporsional berdasarkan prinsip *check and balance*, memperkuat diplomasi ekonomi internasional, dan memperkuat pelaksanaan prinsip *good governance* dalam rangka peningkatan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa.
- e. Saran tindak dengan judul “Antisipasi Dan Solusi Terhadap Gangguan Keamanan Pada Penyelenggaraan Pemilu 2014 Guna Mendukung Pembangunan Nasional”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan gangguan keamanan pada penyelenggaraan pemilu 2014 dalam rangka ketahanan nasional.
  - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya situasi dan kondisi keamanan yang kondusif pada penyelenggaraan pemilu 2014 melalui revisi dan kodifikasi undang-undang pemilu; internalisasi nilai dan makna pemilu secara filosofis, konstitusional, kultural; penindakan preventif untuk meredam konflik guna penyelesaian pelanggaran pemilu secara cepat, tuntas; peningkatan profesionalitas dan integritas moral, optimalisasi fungsi pengawasan dan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilu presiden/wakil presiden guna mendukung pembangunan nasional.
- f. Saran tindak dengan judul “Revitalisasi Program Transmigrasi Di Provinsi Aceh Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk

menentukan kebijakan yang berkaitan program transmigrasi di Provinsi Aceh dalam rangka ketahanan nasional.

- 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya revitalisasi program transmigrasi di Provinsi Aceh melalui intensifikasi komunikasi untuk membangun persepsi positif, optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan lahan, pengembangan infrastruktur, penguatan usaha ekonomi dan kelembagaan serta penyediaan anggaran revitalisasi program transmigrasi yang memadai dalam rangka pengembangan kawasan dan ketahanan pangan.
- g. Saran tindak dengan judul “Revitalisasi Pelabuhan Laut Indonesia guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan revitalisasi pelabuhan laut Indonesia dalam rangka ketahanan nasional.
  - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya revitalisasi pelabuhan laut Indonesia melalui harmonisasi dan sinergitas pengaturan, peningkatan koordinasi antar instansi terkait, peningkatan anggaran pembangunan infrastruktur pelabuhan, peningkatan kelancaran arus barang di pelabuhan guna mendukung pembangunan ekonomi nasional.
- h. Saran tindak dengan judul “Pengembangan Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi antar Kelembagaan secara Terpadu Guna Efisiensi Anggaran Belanja Negara dan Mendukung Keamanan Nasional”
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan pengelolaan sistem teknologi informasi dan komunikasi antar kelembagaan secara terpadu guna efisiensi anggaran belanja negara dalam rangka ketahanan nasional.
  - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya pengelolaan sistem TIK antar kelembagaan secara terpadu melalui penguatan regulasi, pembentukan kelembagaan, pemberdayaan SDM, pembangunan infrastruktur pengelolaan teknologi informasi dan Komunikasi, serta penghematan anggaran guna efisiensi anggaran dan mendukung keamanan nasional.
- i. Saran tindak dengan judul “Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Indonesia dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015”
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia dalam rangka ketahanan nasional.
  - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya kualitas tenaga kerja Indonesia melalui penyempurnaan peraturan turunan Inpres No.11 tahun 2011, penguatan strategi dan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, pembenahan infrastruktur, dan peningkatan anggaran dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

- j. Saran tindak dengan judul “Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara Yang Diakibatkan Tindak Pidana Korupsi”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam rangka ketahanan nasional.
  - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya penerapan UU TPPU melalui perubahan pola pikir aparat penegak hukum untuk penerapan UU TPPU, peningkatan pendeteksian kekayaan hasil Tipikor, peningkatan pemahaman pemangku kepentingan tentang esensi perampasan aset hasil korupsi, peningkatan kerjasama di bidang pemberantasan korupsi dengan negara lain, pemberian sanksi terhadap pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian negara yang diakibatkan Tipikor.
- k. Saran tindak dengan judul “Optimalisasi Penerimaan Negara Bidang Pajak dalam rangka Mendukung Pembangunan Nasional”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan optimalisasi penerimaan negara bidang pajak dalam rangka ketahanan nasional.
  - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya optimalisasi penerimaan negara bidang pajak melalui penguatan regulasi perpajakan yang berorientasi pada upaya pembangunan industri, perlindungan ekonomi nasional, dan penciptaan lapangan kerja, penataan kelembagaan yang fleksibel menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi saat ini dan tuntutan kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang sejalan dengan perkembangan kebutuhan optimalisasi penerimaan pajak serta peningkatan anggaran untuk menunjang kinerja penerimaan pajak dalam rangka mendukung pembangunan nasional.
- l. Saran tindak dengan judul “Implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah Guna Mendukung Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Wajib Belajar Tanpa Biaya”
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional dan wajib belajar tanpa biaya dalam rangka ketahanan nasional.
  - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya implementasi UU Pemerintahan Daerah melalui peningkatan kemampuan daerah sebagai upaya membangun kemandirian daerah, penetapan kebijakan daerah yang visioner di bidang kesehatan dan pendidikan tanpa biaya, peningkatan kesejahteraan antara desa dan kota dan peningkatan kemampuan fiskal dan infrastruktur daerah guna mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional dan wajib belajar tanpa biaya.

2. Pada Tahun Anggaran 2014 Kedeputian Pengembangan telah menghasilkan 11 (sebelas) naskah kajian perkiraan cepat yang merupakan saran tindak strategis bidang Pengembangan, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Saran tindak dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 14/PUU-XI/2013 Tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemilu Legislatif dan Presiden secara terpisah Inkonstitusional”.
    - 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 14/PUU-XI/2013 Tanggal 23 Januari 2014 dalam rangka ketahanan nasional.
    - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya komunikasi dan kesepakatan diantara kekuatan-kekuatan politik yang ada akan konstitusionalitas Pemilu 2014.
  - b. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Eksekusi Pidana Mati TKI di Arab Saudi guna Peningkatan Perlindungan TKI”.
    - 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan antisipasi dan solusi eksekusi pidana mati TKI di Arab Saudi dalam rangka ketahanan nasional.
    - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya mengevaluasi pengiriman TKI ke luar negeri dan memetakan permasalahan secara umum, menetapkan perjanjian bilateral antara negara pengirim tenaga kerja dan negara penerima tenaga kerja yang berpihak pada perlindungan TKI, membuat prosedur penyelesaian masalah TKI secara tuntas khususnya pendampingan pada saat TKI terlibat kasus pidana mati dan *diyat*, melembagakan diplomasi berbasis kedaulatan dan kemanusiaan yaitu melakukan kesepakatan dengan negara-negara yang menerima dan sesama negara pengirim tenaga kerja.
  - c. Saran tindak dengan judul “Penarikan Kewenangan Pelayanan Navigasi Penerbangan dari Singapura oleh Indonesia dalam rangka Penegakan Kedaulatan NKRI”.
    - 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penarikan kewenangan pelayanan navigasi penerbangan dari Singapura oleh Indonesia dalam rangka ketahanan nasional.
    - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya langkah koordinatif dan menselaraskan setiap langkah K/L terkait kewenangan pelayanan navigasi penerbangan di wilayah kedaulatan wilayah udara RI.
  - d. Saran tindak dengan judul “Perkiraan Cepat Antisipasi terhadap Dampak dari Kontroversi UU Nomor 17 Tahun 2014 Revisi dari UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dalam Perspektif Keamanan Nasional”.
    - 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dampak dari kontroversi UU Nomor 17

Tahun 2014 revisi dari UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dalam rangka ketahanan nasional.

- 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya langkah-langkah yang lebih intensif dalam pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran hukum sehingga tidak tergantung pada izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
- e. Saran tindak dengan judul “Perkiraan Cepat tentang MoU-Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan MoU-Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dalam rangka ketahanan nasional.
  - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya pengaturan pengelolaan bersama minyak dan gas bumi pada wilayah antara 0-200 mil laut sesuai Pasal 33 UUD RI 1945, kewenangan bidang pertanahan selain diserahkan ke pemerintah Aceh, pemerintah pusat harus tetap mengendalikan demi tertibnya politik pertanahan dan terjaganya NKRI, dan mensosialisasikan pembentukan pengadilan HAM Aceh tidak perlu dilakukan karena sesuai amanat UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, wilayah Aceh tercakup oleh pengadilan HAM di Medan.
- f. Saran tindak dengan judul “Perkiraan Cepat Peningkatan Daya Saing Nelayan Melalui Revitalisasi Klaster Industri Pengolahan Ikan dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir”
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam rangka ketahanan nasional.
  - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya sinkronisasi dan meningkatkan sosialisasi peraturan dan *road map* tentang industri pengolahan ikan untuk percepatan pengembangan klaster nelayan, memperkuat kebijakan di bidang riset dan teknologi terkait dengan pengembangan teknologi penangkapan dan pengolahan ikan, dan mempercepat pembangunan infrastruktur di pesisir seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengisian bahan bakar, wisata pesisir dan wisata kuliner laut.
- g. Saran tindak dengan judul “Perkiraan Cepat Tentang Antisipasi dan Solusi Pengelolaan Perbatasan Darat dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan darat dalam rangka ketahanan nasional.
  - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya sinergitas dan koordinasi antar K/L yang berada dibawahnya untuk bekerja sama dengan BNPP dan Pemda wilayah perbatasan untuk mempercepat, memperluas program pembangunan sosial ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam yang pro wilayah perbatasan.

- h. Saran tindak dengan judul “Perkiraan Cepat Antisipasi dan Solusi Agenda Revolusi Mental dalam Rangka Pembangunan Karakter Bangsa”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan agenda revolusi mental dalam rangka ketahanan nasional.
  - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya tindakan korektif, melanjutkan proses reformasi yang sudah berjalan dengan mencanangkan revolusi mental melalui menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan *nation building* baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan dan menciptakan sebuah sistem politik yang akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tindakan intimidasi.
- i. Saran tindak dengan judul “Perkiraan Cepat Optimalisasi Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Diatur dan Tidak Dilaporkan dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pemberantasan penangkapan ikan ilegal, tidak diatur dan tidak dilaporkan dalam rangka ketahanan nasional.
  - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya evaluasi dan revisi peraturan menteri yang berpotensi memberikan kelonggaran terhadap terjadinya IUU *Fishing*, perubahan proporsi pendidikan kejuruan di bidang maritim agar mampu mengisi lapangan pekerjaan yang mempunyai kemampuan memadai sesuai dengan bidang keahliannya untuk mengisi lapangan kerja di sektor maritim sesuai standar IMO, sarana dan prasarana patroli serta meningkatkan kerja sama dengan negara tetangga dalam pemberantasan IUU *Fishing* di wilayah perbatasan, dan anggaran K/L terkait penegakan hukum di laut untuk pengadaan sarana dan prasarana patroli.
- j. Saran tindak dengan judul “Perkiraan Cepat Tentang Peningkatan Pariwisata dalam Rangka Menambah Pendapatan Devisa Negara”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan pariwisata dalam rangka ketahanan nasional.
  - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya peningkatan promosi pariwisata Indonesia guna meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara dan domestik ke seluruh nusantara dan kebijakan di bidang pemasaran dan pengelolaan lokasi wisata baik pemerintah pusat atau pemda dan mengikutsertakan pihak swasta maupun masyarakat setempat agar meningkatkan pendapatan asli daerah maupun devisa negara dari pajak-pajak perjalanan yaitu penerbangan, transportasi darat, transportasi laut dan pajak perhotelan/ penginapan, pajak kuliner, pajak barang atau jasa pariwisata yang lain.

3. Pada Tahun Anggaran 2014 Kedepatian Pengembangan telah menghasilkan 1 (satu) naskah kajian Semiloka yang merupakan saran tindak strategis bidang Pengembangan, dengan perincian sebagai berikut:

Naskah kajian hasil Semiloka dengan judu “Ketahanan Pangan Guna Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (Studi Strategis di Jawa Timur)”.

- a) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan pangan di Jawa Timur dalam rangka ketahanan nasional.
  - b) Dampak yang diharapkan terwujudnya ketahanan pangan melalui optimalisasi diversifikasi pangan, peningkatan peran pemerintah daerah, perguruan tinggi dan masyarakat, penambahan luas lahan pertanian, penerapan teknologi pertanian, peningkatan kemampuan petani dalam beradaptasi terhadap anomali musim guna mewujudkan kesejahteraan rakyat di Jawa Timur.
4. Pada Tahun Anggaran 2014 Kedepatian Pengembangan telah menghasilkan 3 (tiga) naskah kajian pengkajian daerah yang merupakan saran tindak strategis bidang Pengembangan, dengan perincian sebagai berikut:

e. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran “Provinsi Bali”

- 1) Manfaat dari pengkajian daerah tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kondisi dan perkembangan permasalahan yang berkaitan di tinjau dari aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan hankam (Ipoleksosbudhankam) di Bali dalam rangka ketahanan nasional.
- 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya ketersediaan daya dukung infra struktur dalam rangka Bali sebagai pintu gerbang pariwisata dan penunjang pangan nasional, pengelolaan pluralitas budaya, sehingga dapat menjadi modal sosial yang bermanfaat dalam mendukung keamanan nasional, peningkatan kualitas dan kuantitas daya dukung hidup seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan.

f. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran “Provinsi Papua”

- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kondisi dan perkembangan permasalahan ketahanan pangan dan konflik komunal di tinjau dari aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan hankam (Ipoleksosbudhankam) di Papua dalam rangka ketahanan nasional.
- 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya ketersediaan, distribusi atau penyaluran pangan secara berkelanjutan, menyusun peta (mapping) produksi pangan, distribusi pangan dan keberlanjutan ketersediaan pangan, dan pendekatan sosial budaya dan tindakan preventif kepada kelompok sipil bersenjata dan sengketa tanah.

g. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran “Provinsi Jawa Timur”

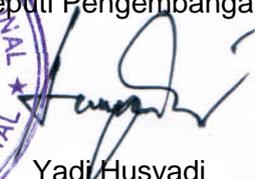
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kondisi dan perkembangan permasalahan ketahanan pangan dan konflik komunal di tinjau dari aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan hankam (Ipoleksosbudhankam) di Aceh dalam rangka ketahanan nasional.
- 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya strategi jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat Aceh, khususnya generasi muda melalui penguatan cinta terhadap budaya dan tanah air, penghormatan terhadap simbol-simbol negara seperti Presiden, Pancasila, gedung-gedung negara, Bendera Merah Putih, Lagu Indonesia Raya.

Demikian laporan hasil kinerja Kedeputan Pengembangan sesuai dengan Penetapan Kinerja Kegiatan Tahun 2014 yang telah ditetapkan.



Jakarta, 28 Januari 2015

Deputi Pengembangan

  
Yadi Husyadi  
Marsekal Muda TNI

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
TAHUN 2014**

**DEPUTI/BIRO : BIRO KEUANGAN**

Program	Kegiatan					Presentase Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket	
	Uraian	Indikator Kerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Terselenggaranya perencanaan anggaran dan administrasi keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas melalui upaya pembinaan anggaran dan keuangan	- Masukan Dana	Rupiah	18.099.720.000	17.854.297.189	98,64		
		- Keluaran						
		1) Terkelolanya layanan dan pembinaan perencanaan anggaran	Bulan	12	12	100		
		2) Terkelolanya layanan dan pembinaan administrasi keuangan	Bulan	12	12	100		
		- Hasil						
		1) Persentase unit kerja yang mengajukan perencanaan kegiatan tahunan secara tepat waktu.	Persentase	100	95	95		
		2) Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu.	Persentase	100	100	100		
		3) Persentase penyerapan anggaran.	Persentase	100	98,54	98,54		
		4) Persentase tagihan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu	Persentase	100	100	100		
		5) Opini BPK terhadap laporan keuangan (WTP)	Peringkat	WTP	)*	)*		
- Manfaat :								
Peningkatan kualitas	Persentase	95	95	100				

Program	Kegiatan					Presen tase Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket
	Uraian	Indikator Kerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		layanan dan pembinaan perencanaan anggaran dan administrasi keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas - Dampak : Terlaksananya layanan dan pembinaan perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan tertib.	Persen tase	95	95	100	

)\* Sampai dengan tersusunnya pengukuran kinerja kegiatan ini masih dilaksanakan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Setjen Wantannas TA 2014, sehingga belum diketahui opininya.

#### Penjelasan :

Pada tahun 2014 Biro Keuangan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan layanan dan pembinaan perencanaan anggaran dan administrasi keuangan di Setjen Wantannas, dengan perincian sebagai berikut:

##### 1. Layanan dan pembinaan perencanaan anggaran

Layanan dan pembinaan perencanaan anggaran yang dilaksanakan adalah mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran seperti penyusunan dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2013, Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dengan hasil penilaian CC sesuai dengan target yang diharapkan sedangkan untuk tahun 2014 masih dalam proses penilaian, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja, Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan menghasilkan peningkatan kualitas perencanaan kegiatan tahunan yang diajukan unit kerja secara tepat waktu sesuai dengan IKU dan penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu.

Manfaat layanan dan pembinaan perencanaan anggaran adalah lebih berkualitasnya layanan dan pembinaan perencanaan anggaran di banding tahun-tahun sebelumnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas.

Dampak pelaksanaan kegiatan layanan dan pembinaan perencanaan anggaran adalah lebih baik dan tertibnya pelayanan dan pembinaan perencanaan anggaran di lingkungan Setjen Wantannas.

## 2. Layanan dan pembinaan administrasi keuangan

Layanan dan pembinaan administrasi keuangan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2014 telah menghasilkan peningkatan kualitas penyelesaian dokumen administrasi keuangan dengan tepat waktu, mempertahankan opini WTP dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Setjen Wantannas TA. 2013 sedangkan untuk opini BPK RI atas Laporan Keuangan TA. 2014 sampai dengan dibuatnya pengukuran kinerja kegiatan ini masih dalam proses pemeriksaan, serta penyelesaian secara tepat waktu atas tagihan pertanggung jawaban keuangan dan optimalisasi penyerapan anggaran.

Manfaat layanan dan pembinaan administrasi keuangan adalah lebih berkualitasnya layanan dan pembinaan administrasi keuangan di banding tahun-tahun sebelumnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas.

Dampak pelaksanaan kegiatan layanan dan pembinaan administrasi keuangan adalah lebih baik dan tertibnya pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen Wantannas.

Jakarta, 29 Januari 2015

Kepala Biro Keuangan



  
Dr. Yudi Sutrasna, MM  
Brigadir Jenderal TNI

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
TAHUN 2014**

**DEPUTI/BIRO : BIRO UMUM**

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi kepegawaian, kerumah-tanggaaan dan administrasi umum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas.	Masukan: dana	Rupiah	5.347.121.000		95	
		Keluaran :					
		1. Terkelolanya administrasi kepegawaian.	Bulan	12	12	100	
		2. Terlaksananya pelayanan kerumah-tanggaaan.	Bulan	12	12	100	
		3. Terkelolanya administrasi umum.	Bulan	12	12	100	
		Hasil:					
		1. Prosentase pengawakan personel yang dibutuhkan organisasi sesuai dengan DSPP.	Persentase	80	78	97	Pengawakan personel belum memenuhi target karena proses belum selesai
2. Persentase pelayanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu	Persentase	100	100	100			
3. Persentase data personil yang mutakhir dan valid.	Persentase	100	100	100			
4. Persentase pegawai yang lulus dari pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis	Persentase	100	88,9	88,9	Diklat yang diikuti (Barjas) cukup sulit		

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dengan predikat baik.					
		5. Persentase tingkat kehadiran pegawai.	Persentase	100	100	100	
		6. Persentase BMN yang baik (layak pakai).	Persentase	100	95	95	Karena adanya BMN yang tidak bisa lagi diperbaiki
		7. Jumlah laporan BMN yang transparan dan akuntabel yang dapat diselesaikan tepat waktu	Persentase	100	100	100	
		8. Persentase sarana dan prasarana yang tersedia dengan jumlah pegawai sesuai dengan standar kualitas pelayanan yang baik.	Persentase	100	100	100	
		9. Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana yang ada.	Persentase	100	100	100	
		10. Persentase dokumen administrasi persuratan dan ekspedisi yang dapat diselesaikan tepat waktu.	Persentase	100	100	100	
		Manfaat:					
		Peningkatan pelayanan administrasi	Persentase	100	95	95	

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kepegawaian, kerumah tanggaan dan administrasi umum.  Dampak: Terlaksananya layanan dan pembinaan kepegawaian, kerumah tanggaan dan administrasi umum	Persen tase	100	95	95	

Penjelasan:

Pada tahun 2014 Biro Umum telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan layanan administrasi kepegawaian, kerumah tanggaan dan administrasi umum dengan perincian sebagai berikut:

1. Administrasi kepegawaian

Manfaat:

Meningkatnya mutu dan kualitas pelayanan bidang Kepegawaian, meningkatnya kinerja dan kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas/fungsi serta meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pegawai.

Dampak:

Terlaksananya administrasi kepegawaian tepat waktu dan peningkatan kualitas kompetensi SDM

2. Layanan Kerumah Tanggaan:

Manfaat:

Layanan Kerumah Tanggaan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2014, telah menghasilkan peningkatan kualitas layanan dan penyelesaian administrasi BMN dengan tepat waktu sesuai dengan IKU serta penyelesaian administrasi pelaporan BMN yang dapat di selesaikan tepat waktu.

Meningkatnya layanan dan pengelolaan BMN dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan sesuai dengan tupoksi Setjen Wantannas.

Dampak:

Pelaksanaan kegiatan layanan kerumahtanggaan menjadi tertib dan lebih baik.

3. Administrasi umum

Manfaat : Meningkatkan dukungan mutu dan kualitas pelayanan tata usaha dan kesekretariatan persuratan dan ekspedisi, meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelayanan di 4 (empat) Kedeputian, Staf Ahli dan Pimpinan.

Dampak :

Terlaksananya tata naskah dinas dan ekspedisi persuratan yang sesuai dengan tata naskah dinas administrasi umum Setjen Wantannas.

Jakarta, 23 Januari 2015



Kepala Biro Umum

Supomo, S.IP, M.Sc  
Marsekal Pertama TNI

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
TAHUN 2014**

**DEPUTI/BIRO : BIRO PERSIDANGAN DAN HUMAS**

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Terselenggaranya pengelolaan persidangan dan Humas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Setjen Wantannas melalui upaya pembinaan persidangan dan humas	- Masukan : Dana	Rupiah	189.090.000	183.495.800	97,04	
		- Keluaran : Terkelolanya layanan Persidangan dan Humas	Bulan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100	
		- Hasil : 1) Persentase pelayanan persidangan yang terlaksana dengan baik	Persentase	100	90	90	
		2) Persentase bahan/materi persidangan yang diproduksi dan direproduksi	Persentase	100	100	100	
		3) Persentase digitalisasi arsip dan perpustakaan lengkap dan mutakhir	Persentase	80	80	100	
		4) Persentase publikasi/pembelitan tentang kegiatan Setjen Wantannas yang dilaksanakan	Persentase	100	100	100	
		5) Jumlah e-dokumen yang diupload di website Setjen	Persentase	90	80	88,9	

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Wantannas</p> <p>6) Jumlah pengunjung website Setjen Wantannas</p> <p>Persentase</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>					
		<p>- Manfaat :</p> <p>Peningkatan kualitas layanan dan Pembinaan Persidangan dan Humas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas</p> <p>Persentase</p> <p>90</p> <p>80</p> <p>88,9</p>					
		<p>- Dampak :</p> <p>Terlaksananya pelayanan dan pembinaan Persidangan dan Humas dengan baik dan tertib.</p> <p>Persentase</p> <p>90</p> <p>85</p> <p>94,4</p>					
Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	Terselenggara hubungan pelaporan dan koordinasi dengan Ketua dan Anggota Wantannas serta mitra kerja	<p>- Masukan : Dana</p> <p>Rupiah</p> <p>258.500.000</p> <p>84.648.600</p> <p>32, 75</p>					
		<p>- Keluaran Terkelolanya hubungan pelaporan dan koordinasi dengan Ketua dan Anggota Wantannas serta mitra kerja</p> <p>Persentase</p> <p>100</p> <p>90</p> <p>90</p>					
		<p>- Hasil Persentase Sidang Dewan dan Forum Bakohumas yang</p> <p>Persentase</p> <p>60</p> <p>60</p> <p>100</p>					

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		terlaksana dengan efektif dan efisien.					
		- Manfaat : Peningkatan kualitas hubungan pelaporan dan koordinasi dengan Ketua dan Anggota Wantannas serta mitra kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas	Persentase	90	80	88,9	
		- Dampak : Terlaksananya hubungan kerjasama dengan mitra kerja dengan baik dan lancar.	Persentase	90	85	94,4	
	Terselenggaranya pengelolaan jalur komunikasi data yang aman dan mutakhir dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Setjen Wantannas	- Masukan : Dana	Rupiah	162.215.000	161.945.000	99,83	
		- Keluaran : Terkelolanya pengembangan informasi dan teknologi yang mutakhir.					
		- Hasil : 1) Ranking hasil evaluasi Kemen Kominfo terhadap pelaksanaan manajemen keamanan informasi Setjen Wantannas.	Rangking	5	6	83	
		2) Jumlah Naskah MOU dengan K/L dan Instansi terkait.	Persentase	100	0	0	*)

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		3) Jumlah penggunaan aplikasi Sisfo Setjen Wantannas	Instansi	20	0	0	*)
		- Manfaat : Sebagai sarana dalam memberikan masukan penentuan kebijakan nasional bagi Ketua Dewan dan sebagai sarana kordinasi dengan anggota tetap dan K/L.	Persentase	90	80	88	
		- Dampak : Terlaksananya pengembangan informasi dan teknologi yang mutakhir.	Persentase	90	80	88	

Keterangan :

\*) : *self blocking* sebagaimana instruksi pada Inpres Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-langkah Penghematan dan pemotongan Belanja K/L Dalam Rangka Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014

**Penjelasan:**

Pada Tahun 2014 Biro Persidangan dan Humas telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu :

- a. Melaksanakan pelayanan Persidangan dan Humas di Setjen Wantannas
- b. Melaksanakan kegiatan diseminasi informasi
- c. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi

Secara rinci, kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

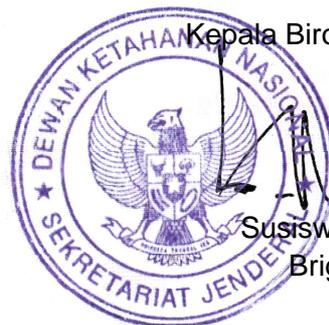
- Dengan membuat rencana kegiatan sebagai pedoman dalam mendukung kelancaran pelayanan persidangan / kegiatan rapat dengan efektif dan efisien.
- Dukungan yang maksimal dalam urusan produksi dan reproduksi materi/bahan sehingga penyelenggaraan persidangan dapat berjalan dengan lancar.
- Penyelenggaraan forum Bakohumas Setjen Wantannas yang telah dilaksanakan dengan baik menunjang keberhasilan pencapaian target sasaran.
- Melakukan pengamanan terhadap aset informasi Setjen Wantannas yang kemudian mendapatkan penilaian manajemen keamanan informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Pelayanan pada perpustakaan Setjen Wantannas sudah dibangun berbasis aplikasi digitalisasi arsip secara lengkap dan mutakhir guna mempermudah proses pekerjaan dan pelayanan.
- Dalam rangka membangun sistem informasi dan komunikasi perlu adanya MoU dengan K/L dan instansi terkait, namun terdapat perubahan target terkait adanya self blocking yang tertuang pada Inpres Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-langkah Penghematan dan pemotongan Belanja K/L Dalam Rangka Pelaksanaan APBN TA. 2014.

**Manfaat** : Layanan persidangan dan humas akan lebih baik dan maksimal dalam memfasilitasi berbagai macam kegiatan sidang dan pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas.

**Dampak** : Terdukungnya layanan persidangan dan kehumasan yang lebih meningkat dan berkualitas dalam berbagai penyelenggaraan kegiatan Setjen Wantannas.

Jakarta, 20 Februari 2015

Kepala Biro Persidangan dan Humas



Susiswo Widodo, M.Si (Han)  
Brigadir Jenderal TNI



**LAMPIRAN III**

**CHECK LIST TIM PENGAWAS INTERNAL**

**ATAS LAPORAN KINERJA**

**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**TAHUN 2014**



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**HASIL REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	PERNYATAAN		CHECK LIST
1	2		3
1	Format	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP</li><li>2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja</li><li>3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai</li><li>4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan</li><li>5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan</li><li>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan</li></ol>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>
2	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu</li><li>2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai</li><li>3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj</li><li>4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data / informasi di setiap unit kerja</li><li>5. Data / informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya</li><li>6. Analisis / penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait</li><li>7. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya</li></ol>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

NO	PERNYATAAN		CHECK LIST
1	2		3
3	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja</li> <li>2. Tujuan / sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis</li> <li>3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>4. Target Indikator Kinerja tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja</li> <li>5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan</li> <li>6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat</li> <li>8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan / sasaran</li> <li>9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>10. IKU dan IK telah SMART</li> </ol>	<p style="text-align: center;">✓</p>

Jakarta, 25 Februari 2015

Ketua Tim Pengawas Internal  
Setjen Wantannas



Afandi Abdullah, SH., MA  
Kolonel Arm. / NRP. 29658



**LAMPIRAN III**

**CHECK LIST TIM PENGAWAS INTERNAL**

**ATAS LAPORAN KINERJA**

**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**TAHUN 2014**



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**